

**HUBUNGAN KOORDINASI
ANTARA POLISI PAMONGPRAJA DAN POLRI
DALAM PELAKSANAAN UPAYA PAKSA
TERHADAP KASUS-KASUS ASUSILA
DI KABUPATEN SEMARANG**



T E S I S

Oleh :
ENDHUNG SULISTIONO, SH
Nim. B4A000028

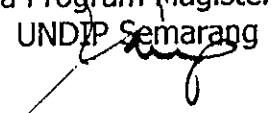
**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004**

**HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA POLISI
PAMONGPRAJA DAN POLRI DALAM PELAKSANAAN
UPAYA PAKSA TERHADAP KASUS-KASUS ASUSILA
DI KABUPATEN SEMARANG**

TESIS

**Diajukan guna memenuhi persyaratan dan tugas Magister Ilmu
Hukum bidang kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Mengetahui :
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
UNDIP Semarang


Prof. DR. Barda Nawawi Arief SH
NIP. 130 250 519

Ditetujui oleh :


Prof. DR. Barda Nawawi Arif SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul "HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA POLISI PAMONGPRAJA DAN POLRI DALAM PELAKSANAAN UPAYA PAKSA TERHADAP KASUS-KASUS ASUSILA DI KABUPATEN SEMARANG "

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun tesis ini namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari pembaca.

Tidak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bp Prof DR Is Susanto SH (Alm) selaku Pembimbing awal yang kemudian dilimpahkan kepada Bp Prof DR Barda Nawawi Arif SH
2. Bp Prof DR Barda Nawawi Arief SH selaku ketua program S –2 ilmu hukum UNDIP Semarang sekaligus pembimbing tesis.
3. Bp. Soeryono Sutarto SH MH selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
4. Semua pihak yang turut serta membantu penulis dalam penelitian hingga penulisan tesis.

Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan juga ilmu pengetahuan bidang studi kepolisian pada khususnya.

Penulis

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat dua lembaga penegakan hukum yakni polisi dan penyidik pegawai negeri sipil, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Polisi sebagai penyidik merupakan suatu hukum yang hidup dan secara sosiologis merupakan ujung tombak bekerjanya hukum, namun ada lembaga lain yang juga efektif sebagai penyidik dalam melaksanakan penegakkan hukum yaitu Polisi Pamongpraja.

Di Kabupaten Semarang Polisi Pamongpraja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati no:061/8/2002 tanggal 19 Juni 2002. Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas terutama dalam melakukan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila kurang memperhatikan standar kerja dan etika kerja profesional sebagaimana Polri sebagai penyidik pada umumnya sehingga penulis merumuskan permasalahan :

1. Bagaimanakah pengetahuan tentang teknik dan taktik yang dikuasai oleh Polisi Pamongpraja kabupaten Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus asusila ?
2. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat hubungan koordinasi antara Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang dengan Polri dalam melaksanakan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila di Kabupaten Semarang ?

Tujuan penelitian ini untuk memberikan dan memperoleh gambaran empiris tentang karakteristik penyidikan oleh polisi pamongpraja, cara penyelesaian kasus-kasus asusila, serta untuk memperoleh penjelasan tentang hubungan koordinasi antara polri dengan polisi pamongpraja. Penelitian dilaksanakan dengan mempergunakan metode empiris dengan pendekatan fungsional dan struktural, mempergunakan interpretasi dan analisis yang lazim dipergunakan dalam penelitian empiris. pengambilan sampel dengan cara non random sampling.

Dari hasil penelitian dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan tentang teknik dan taktik yang dikuasai oleh Polisi Pamongpraja kabupaten Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus asusila kurang memadai karena hanya dibekali dengan pengetahuan dasar kepolisian tanpa pengetahuan tentang proses penyidikan secara lengkap.

Kata Kunci :

- Hubungan koordinasi
- Upaya paksa

ABSTRACT

In Indonesia there are two institutions which stricts law called police and state officer investigations, according to chapter 6 verse 1 KUHAP (Penal code). The Police as an investigation as a life law and the edge of investigating in doing striking law is regional police.

The Regional Police in Semarang Region is formed base of Regent decision Letter no 061/8/2002 and June 19th 2002. the Regional Police, Semarang Region in doing task mainly to cope all the unmorality cases never pay attention to working standard and profesionalis whereas the Police as an investigator generally, so the writer construc the problems :

1. How is the knowledge about tecnic and tactic is had b y the Regional Police in Semarang Region in solving unmorality cases.
2. What factors are support and delay the relationship between Regional Police and Corp in doing hand way in unmorality cases in Semarang Region.

This research is giving and getting emphiris view about the characteristic investigating by Regional Police, The way out of unmorality cases and get an explanation about the relationshio between the Regional Police and Corps. This research is done by using emphiris method and functional approach use interpretation and analyse which is used in emphiris researching. Sample is taken by non random sampling.

From the result of research and analyse which is got We can conclude that knowledge about tecnic and tactic is had by Regional Police and finishing unmorality cases inadequate way because They just given base knowledge from the corp without the complete investigation process.

Pass word :

- Koordination Relationship
- Hard way

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Kerangka Teori Konseptual	10
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
E1. Manfaat dalam bentuk praktis	13
E2. Manfaat dalam bentuk teoritis	14
F. Metode Penelitian	15
a. Jenis Penelitian	15
b. Metode pendekatan masalah	15
c. Populasi dan penentuan sampel	16
d. Teknik pengumpulan data	16
e. Teknik analisa data	17
G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Ketentuan Yuridis Tentang Polisi.....	19
B. Polisi Pada Posisi Hukum dan Sosial.....	38
C. Pengertian Diskresi Polisi	53

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	62
	A. Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan Yang dikuasai Oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang Dalam Penyelesaian Kasus-kasus Asusila	62
	1. Teknik dan Taktik Penyidikan Oleh Polisi	62
	2. Teknik dan Taktik Penyidikan Oleh Polisi Pamong Praja	82
	3. Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa	111
	B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Upaya Paksa	120
	1. Hubungan Koordinasi Antara Polisi Pamong Praja Dan Polri	120
	2. Fungsi Upaya Paksa Bagi Penyidik	122
	3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Hubungan Koordinasi	128
 BAB III	 PENUTUP	 135
	a. Kesimpulan	135
	b. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Persepsi hukum modern memang menghendaki agar orang memandang kehadiran hukum dan upaya terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai suatu yang tidak personal dan bersifat independen. Bagi masyarakat modern hukum tidak hadir dalam suatu sosok yang abstrak, utopis dan subjektif, melainkan sebagai sesuatu yang mengkristal dalam bentuk formal, nasional serta lengkap dengan birokrasinya.

Hukum itu bukan hanya barang di atas kertas, melainkan sesuatu yang dipraktekkan dan dalam konteks itu hukum selalu mengalami ujian dalam kehidupan sehari – hari. Tidak jarang ada kalanya orang mengatakan bahwa Undang – undang itu hanyalah susunan huruf – huruf mati belaka. Hukum itu adalah sekedar serangkaian huruf hitam putih yang tidak berdaya ¹⁾

Jangan dikatakan bahwa hukum itu hanya mengatur, memerintah, memaksa, membebani masyarakat secara psikologis,

¹⁾ Wahid Abdul, 1995 Hukum Suksesi dan Arogansi Kekuasaan, Tarsito, Bandung , hal. 40.

kultural dan material .Terhadap hal ini perlu diamati persepsi hukum di negara – negara berkembang, terutama apa yang diungkapkan oleh Nonet dan Selznick tentang hubungan hukum dengan penindasan. Setiap tata hukum berpotensi untuk melakukan penindasan . Hal serupa juga diungkapkan oleh Gunnar Myrdal dengan mengatakan bahwa semua negara berkembang, sekalipun dalam kadar yang berlainan, adalah negara – negara yang lembek (*Soft State*), mencakup semua bentuk ketidak-disiplinan sosial yang manifestasinya adalah cacat perundang – undangan dan terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum ²⁾

Walaupun diakui bahwa norma hukum itu mempunyai suatu kebenaran secara sosiologis serta mempunyai kebenaran secara formal dalam peradilan.

Penegakan hukum, dimanapun di belahan bumi ini tidak bisa terlepas dari hak asasi serta penegakan hukum yang dibarengi dengan adanya unsur kekerasan, walaupun cara dan pelaksanaan kekerasan tersebut berlainan, sorotan yang sakartis dari masyarakat terhadap penegakan hukum terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum

²⁾ Satjipto Rahardjo, 1995, Studi Kepolisian Indonesia, Metodologi dan Subtantif, Makalah Simposium Nasional Polisi, Semarang, hal. 74.

paling depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti polisi, aparat ketertiban umum dan petugas – petugas kamtibmas.

Mengapa sampai menimbulkan pertanyaan yang demikian dari masyarakat, hal ini terjadi karena mencuatnya unsur kekerasan dan penyiiksaan belakangan ini, seperti kasus tewasnya buruh Marsinah dan kasus kasus lain.

Hal ini berasal dari upaya paksa yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik, tetapi harus diakui juga bahwa upaya paksa bukan monopoli penyidik Polri, ada juga lembaga lain di luar lembaga polisi yang juga melakukan hal itu. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selanjutnya dalam tulisan ini Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana tersebut disebut KUHP.

Pasal – pasal dalam KUHP yang mengatur tentang siapa – siapa yang berwenang melakukan penyidikan dapat ditemui dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP yakni :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang.

Berdasarkan tugas wewenang polisi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan tugas wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Polisi sebagai penyidik merupakan suatu hukum yang hidup dan secara sosiologis merupakan ujung tombak bekerjanya hukum itu serta secara normatif merupakan subsistem dari bekerjanya suatu sistem peradilan pidana. Polisi melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan serta mengumpulkan keterangan dan memeriksa surat – surat, kemudian membuat berita acara pemeriksaan (BAP) untuk diajukan kepada jaksa, guna diadakan penuntutan. Penuntutan diajukan oleh jaksa ke pengadilan, selanjutnya pengadilan mengadakan sidang, menjatuhkan vonis, membebaskan atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Secara umum proses tersebut merupakan kemasan komponen sistem peradilan pidana, mulai dari komponen polisi, jaksa dan lembaga pemasyarakatan tidak seluruhnya merupakan permasalahan dari sistem peradilan pidana untuk menjelaskan, karena tanggung jawab ahli – ahli sosiologi juga ada didalamnya untuk menjelaskan.

Sehubungan dengan hal itu, ada lembaga (institusi) di luar polisi tetapi juga dianggap efektif sebagai penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum, sebagai contoh dapat diungkapkan cara operasional

lembaga polisi pamongpraja di Kabupaten Semarang. Polisi Pamongpraja dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor : 061 / 8 / 2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Pembentukan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.

Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang dibentuk dengan tujuan (*goals*) untuk membantu Bupati Semarang dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Semarang serta peraturan perundangan lainnya yang menjadi tugas Bupati Semarang dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban. Bila ditelusuri lebih jauh lagi tentang polisi pamongpraja yang dibentuk di Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya sebatas penertiban pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan Bupati saja, akan tetapi telah melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan surat – surat serta penahanan terhadap pelaku, terutama sekali terhadap pelanggar Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati.

Sejauh yang penulis amati, Polisi Pamongpraja mempunyai permasalahan dalam melaksanakan tugas, terutama dalam melakukan upaya paksa. Salah satu permasalahannya adalah kurang

diperhatikannya standar kerja dan etika kerja profesional (*Professional standar and professional ethics*) sebagaimana yang dimiliki oleh polisi sebagai penyidik pada umumnya.

Sesuatu yang sangat menarik adalah dalam menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran maupun kejahatan , setelah Polisi Pamongpraja melakukan upaya paksa, tidak satu pun kasus yang diperiksa oleh Polisi Pamongpraja diajukan ke sidang pengadilan dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Suatu permasalahan yang membutuhkan jawaban untuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Kemaksiatan merupakan perbuatan asusila, baik berupa pelanggaran ataupun berupa kejahatan. Sanksinya sudah diatur dalam Hukum Pidana (KUHP) dan bukan merupakan keputusan kepala daerah atau berupa peraturan daerah ataupun peraturan pusat yang berlaku di daerah, tetapi merupakan undang – undang nasional yang sudah dikodifikasi dan unifikasi secara nasional. Kemudian muncul pertanyaan, apakah tugas yang dilaksanakan oleh Polisi Pamongpraja terhadap pemberantasan kemaksiatan tersebut memang merupakan yurisdiksi mereka atau merupakan suatu *over authority* dari tugas mereka.

Hal lain yang tidak kalah menarik adalah Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) – nya yang antara lain berbunyi :

“ Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ”.

Ini berarti secara eksplisit KUHAP menginginkan adanya hubungan koordinasi fungsional antar lembaga yang melakukan tugas penyidikan dan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Penyidikan memiliki karakteristik yang khas dan menyangkut permasalahan yang kompleks, baik secara *legal institution* maupun *Social institution*. Oleh sebab itu hubungan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri merupakan langkah yang dipertimbangkan oleh pembuat Undang – undang untuk mencatulkannya dalam KUHAP.

Dalam praktek, adakah faktor – faktor penghambat atau adakah faktor – faktor pendukung terlaksananya hubungan koordinasi fungsional antara Polisi Pamongpraja dengan Polri ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengamati bahwa kajian yang berkaitan

dengan hubungan koordinasi fungsional ini masih jarang, terutama hubungan koordinasi antara Polisi Pamongpraja dengan polisi. Kalaupun ada masih dalam bentuk tulisan atau artikel. Langka atau jaranganya penelitian mengenai hubungan koordinasi fungsional antara Polisi Pamongpraja dengan polisi dalam melakukan upaya paksa tersebut yang mendorong penulis untuk meneliti, menginterpretasikan, mengamati dan membuat kajian. Disamping itu juga perlu mengamati dan menginterpretasikan perilaku yang ditimbulkan oleh Polisi Pamongpraja terhadap masyarakat Kabupaten Semarang tentang perbuatan – perbuatan asusila yang berhubungan dengan perbuatan asusila.

Dengan penelitian yang bersifat empiris dan komprehensif diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ditemui dan memberikan argumen – argumen untuk penyelenggaraan penyidikan, terutama sekali penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Pamongpraja dengan melaksanakan upaya paksa terhadap pelaku – pelaku kemaksiatan (asusila), sehingga mampu untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan hukum dalam rangka mencapai tujuan nasional.

B. Perumusan Masalah

Hal yang paling utama adalah hubungan koordinasi yang bagaimana harus dilaksanakan, dimana pada satu sisi polisi harus melaksanakan ketentuan KUHP dalam melakukan penyidikan dengan menggunakan upaya paksa, sementara itu pada sisi lain Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang melemahkan ketentuan KUHP dalam melaksanakan upaya paksa tersebut. Faktor – faktor apakah yang mendukung dan faktor – faktor apakah yang menghambat hubungan koordinasi itu dilaksanakan.

Bagaimanapun hal sebagaimana tersebut diatas merupakan perilaku institusi yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu penjelasan untuk pemecahannya (*Alternative Solution*) untuk menegakan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan yang dikuasai oleh Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus asusila ?

2. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat hubungan Koordinasi antara Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang dengan POLRI dalam melaksanakan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila di Kabupaten Semarang ?

C. KERANGA TEORI KONSEPTUAL

Melaksanakan upaya paksa oleh penyidik merupakan permasalahan yang aktual apalagi yang melaksanakan upaya paksa tersebut adalah Polisi Pamongpraja (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Seperti diketahui bahwa keberadaan (*existence*) Polisi Pamongpraja adalah menertibkan setiap pelanggaran terhadap peraturan daerah, keputusan Bupati serta peraturan pusat yang berlaku di daerah.

Polisi Pamongpraja memberantas kasus asusila dengan melakukan upaya paksa merupakan pelimpahan wewenang oleh Bupati Semarang berdasarkan Keputusan Bupati Semarang. Keberadaan Polisi Pamongpraja semakin menarik dengan posisi yang diambil oleh Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang belakangan ini yang membawa mereka ke dalam ruang lingkup KUHAP. Keberadaan KUHAP tidak bisa ditawar – tawar, karena merupakan pedoman dari hukum pidana

formal. Alasan lainnya secara sosiologis dapat diungkapkan bahwa, konsekuensi pemberantasan setiap kejahatan tidak bisa dianggap ringan. Alasan lain yang sangat mendasar adalah kekhawatiran akan terancamnya hak asasi masyarakat jika terlalu banyak badan penyidik formal. Masyarakat akan sulit mencari kepastian hukum.

Pengembangan tugas yang dilaksanakan oleh Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang menjadikan permasalahan tersendiri yang perlu diamati, karena tiada satu kasuspun dari pemberantasan kemaksiatan, diajukan ke sidang pengadilan dalam proses sistem peradilan pidana. Namun demikian perilaku – perilaku yang ditampilkan oleh Polisi Pamongpraja Kabupaten Semarang dalam melakukan upaya paksa terhadap pelaku – pelaku yang dianggap melakukan perbuatan asusila tersebut, menurut anggapan masyarakat Kabupaten Semarang dapat menimbulkan budaya malu untuk berbuat asusila.

Perlu diadakannya penelitian empiris untuk menjelaskan tentang anggapan tersebut. Tiada maksud untuk mempertentangkan atau memperbandingkan sistem kerja (*framework*) antara polisi dengan Polisi Pamongpraja, tetapi ada sisi lain yang harus dijelaskan, diamati, disoroti, sekaligus diadakan penelitian tentang timbulnya dua kerangka kerja dalam penyidikan. Pertama adalah polisi sebagai perangkat umum

dalam KUHAP dengan segala perilaku dan perbuatan polisi yang telah diatur dalam KUHAP untuk lancarnya dan adanya kepastian hukum pada sistem peradilan pidana. Kedua, Polisi Pamongpraja sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil yang juga diatur dalam KUHAP, tetapi perbuatan dan perilaku pada saat melakukan penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitu juga penyelesaian kasus yang mereka tangani. Visi masyarakat ternyata mendukung perilaku Polisi Pamongpraja tersebut dari sudut sosiokultur.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemahaman secara jelas mengenai hubungan koordinasi fungsional antara Polisi Pamongpraja dengan polisi dalam melaksanakan upaya paksa, jika dikaitkan dengan permasalahan maka, tujuan penelitian secara garis besarnya adalah :

1. Memperoleh gambaran mengenai teknik dan taktik penyidikan oleh Polisi Pamong praja dan dapat mengetahui alasan – alasan secara empiris tentang penyelesaian kasus – kasus yang tidak pernah sampai ke sidang pengadilan.

2. Mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat hubungan koordinasi antara Polisi pamong praja dengan POLRI dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil ini dapat memberikan dua manfaat, yaitu manfaat dalam bentuk praktis dan manfaat dalam bentuk teoritis.

1. Manfaat dalam bentuk praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum : diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum, baik itu penyidik dari polisi maupun dari Polisi Pamongpraja, sehingga dalam melaksanakan upaya paksa dan penyelesaian kasus yang berkaitan asusila dapat lebih proporsional dan profesional.
- b. Bagi pembaca : hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hubungan koordinasi fungsional antara polisi dengan Polisi Pamongpraja dalam melaksanakan upaya paksa dan memberi gambaran tentang

cara kerja (operasional) dari Polisi Pamongpraja sebagai penyidik.

- c. Bagi para penentu kebijakan / pembuat keputusan : hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi – informasi atau masukan – masukan dalam menentukan dan mengambil kebijakan.
- d. Bagi peneliti sendiri : diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk dapat memperdalam pengetahuan mengenai materi Sosiologi Hukum dalam Hukum Pidana, khususnya Sosiologi Kepolisian dan dapat mengembangkan gagasan pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang aktual.

2. Manfaat dalam bentuk teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Sosiologi Hukum yang berhubungan dengan Hukum Pidana, khususnya tentang Sosiologi Kepolisian dan berusaha memberikan sumbang pikiran dalam bentuk konsep – konsep teoritis di dalam kesimpulan.

F. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi.

Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan

b. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah mempergunakan pendekatan Juridis Sosiologis (Socio-Legal approach) karena membahas permasalahan antara faktor juridis terhadap faktor sosiologis. Terutama sekali masyarakat Kabupaten Semarang yang menginginkan bebas dari segala bentuk pelanggaran asusila dan

berdasarkan Keputusan Bupati Semarang melimpahkan kewenangannya kepada Polisi Pamongpraja, tetapi pelaksanaan penegakan hukumnya tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang ditentukan oleh KUHP.

C. Populasi dan Penentuan Sample

Penentuan wilayah penelitian dengan menggunakan cara ***Non random sampling*** dengan mengambil jumlah unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mungkin dicapai oleh peneliti dan yang memiliki karakteristik tertentu. Wilayah penelitian adalah Kabupaten Semarang. Untuk menentukan sample yang bertolak dari asumsi realitas sosial itu, diperlukan metode pengambilan sampel dengan memuat unsur – unsur sampel.

Sampel yang diambil berdasarkan populasi dari Polisi pamong Praja. Polri yang bertindak sebagai penyidik, serta tokoh-tokoh masyarakat.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adalah untuk mengumpulkan data dari sumber – sumber penelitian, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.

1. Sumber data primer diperoleh melalui :

a. Wawancara

b. Observasi

2. Sumber data sekunder diperoleh melalui Penelitian Perpustakaan (Library Research).

Melalui teknik pengumpulan data dapat dipelajari hukum sebagai dependent variabel yang timbul dari resultante berbagai kekuatan dalam proses sosial ³⁾

e. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisa data. Data yang bersifat kualitatif, diidentifikasi, dikategorikan dalam sistematika metode analisa kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan.⁴⁾

Data setelah diolah akhirnya dianalisa secara diskriptif analitis artinya apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisa yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tesis. Dari analisa tersebut kemudian

³⁾ Ronny Hanityo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan IV, Ghalia Indonesia.

⁴⁾ Tatang M Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, CV Rajawali, Jakarta.

ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik penganalisisan data.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan tesis ini diawali bab I pendahuluan yang mengantar pada para pembaca untuk mengetahui latar belakang masalah, dengan didasari identifikasi dan perumusan masalah, kerangka teori konseptual serta tujuan dan manfaat penelitian disamping juga diuraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II tinjauan pustaka, mengemukakan landasan teori tentang pengertian polisi secara normatif, sosiologis serta diskresi polisi terhadap hukum dan ketertiban.

Bab III hasil penelitian dan analisis, merupakan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab perumusan masalah sekaligus dianalisis.

Bab IV penutup berisi kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil penelitian secara keseluruhan serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Polisi Secara Normatif

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda – beda. Istilah yang diberikan oleh tiap – tiap negara terhadap pengertian Polisi adalah berbeda oleh karena masing – masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri, misalnya **Constable** di Inggris mengandung dua macam arti, pertama sebagai sebutan terendah di kalangan kepolisian (**Police Constable**) dan kedua berarti kantor Polisi (**Office of Constable**), di Jerman dengan sebutan "**Polizei**" Belanda dengan sebutan "**Politie**".¹⁾

Dalam kamus Poerwadarminta, istilah polisi berarti :²⁾

1. Badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan.

1) Momo Kelana 1994, Hukum Kepolisian , Grasindo , Jakarta, hal. 13.
2) Poerwadarminta WJS 1962, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta, hal. 549.

Dari definisi tersebut, polisi berarti tiap – tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.

Pembahasan tentang polisi secara normatif perlu didekati dalam beberapa ketentuan yang antara lain tugas fungsi, wewenang dan ketentuan yuridis mengenai Polisi.

Tugas utama Polisi dalam perkembangannya berkisar pada penegakan hukum (*law enforcement*) memelihara ketertiban umum (*order maintainance or peacakeeping*) serta pelayanan masyarakat (*provide service*). Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan Hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
-

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban lalu-lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian , kedokteran kepolisian , laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian ;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang ;
- k. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Dari kutipan di atas terlihat bahwa tugas pokok polisi seperti ditegaskan dalam Pasal 13 Undang – undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) ialah penegak hukum dan memelihara keamanan dalam negeri. Tugas tersebut dirinci lebih luas di dalam Pasal 14 yang mencakup berbagai aspek yang sangat luhur dan mulia yaitu :

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum.
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan / perbuatan melanggar hukum / kejahatan dari penyakit – penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang membahayakan) termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
- c. Aspek pendidikan social di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.

- d. Aspek penegakan hukum dibidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Undang – undang Pertahanan dan Keamanan (UU No. 20 Tahun 1982) juga menyebutkan tugas Kepolisian di dalam Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama – sama dengan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang – undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Undang – undang Pertahanan dan Keamanan tersebut menggambarkan tugas pokok kepolisian antara lain :

1. Sebagai penegak hukum;

2. Sebagai pengayom, dan
3. Sebagai pelindung masyarakat.

Fungsi, peran atau tugas Polisi sering dipengaruhi oleh legitimasi terhadap Polisi, situasi sosial, ekonomi dan politik. Semakin besar legitimasi terhadap Polisi, semakin besar pula fungsi, peran dan tugas Polisi di tengah masyarakat. Demikian juga, semakin tinggi tingkat keresahan atau konflik – konflik yang terjadi dalam masyarakat, mengakibatkan semakin besar pula tanggung jawab, fungsi, peran dan tugas Polisi di dalam masyarakat.

Ellen Hochstedler memberikan gambaran tentang empat macam tipe yang menjadi fungsi dan peran dari Polisi yakni *supercop*, *professional*, *service oriented* dan *avoider*. Secara singkat tipe – tipe tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : ³⁾

1. Tipe Supercop

- a. Peran sebagai penegak hukum yang utama
- b. Tidak menolak menggunakan kekuatan dan seringkali spontan
- c. Pandangan sempit terhadap peran Polisi, mengutamakan perang terhadap kejahatan dan acuh terhadap fungsi pelayanan masyarakat.

³⁾ Adiansyah.1995. Polisi Masyarakat dan Negara, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal 70 .

- d. Menganggap enteng pelanggaran – pelanggaran hukum yang ringan, kejahatan konvensional, sebab bukan urusan Polisi dan hanya tertarik pada kejahatan – kejahatan yang serius.

2. Tipe Profesional

- a. Terlatih dan mampu melaksanakan tugas – tugas yang komplis dan sulit.
- b. Pandangan yang luas terhadap tugas yang dalam persepsi profesi seimbang.
- c. Mampu membedakan kepentingan pribadi dan tugas, mampu mengendalikan luka perasaan dirinya jika peran kepolisiannya diserang.
- d. Mampu memandang persoalan dari sisi yang berbeda, berpikir dingin, rasional, kreatif, kompeten dalam berbagai situasi.

3. Tipe Service Oriented

- a. Tidak tertarik tugas memerangi kejahatan, lebih terikat tugas menolong sesama.
- b. Mengutamakan pendekatan persuasif dan dialog, berperan sebagai pekerja sosial dan agen perubahan.
- c. Memperlakukan klien dengan penuh perhatian dan penghargaan serta berusaha menumbuhkan sikap positif terhadap sesama.

- d. Berjiwa pelayanan, pengabdian berusaha melakukan tindakan berdasarkan pendekatan kebersamaan dari pada tindakan penangkapan atau penggunaan kekuatan.

4. Tipe Avoider

- a. Bekerja seminimal mungkin, malas, kerja tidak efisien, tidak menyenangkan, ketakutan, bingung atau putus asa.
- b. Bertindak diluar tugas kepolisian. Tidak sesuai dengan realitas.

Dua skenario pengembangan dalam tugas dan fungsi kepolisian: ⁴⁾

1. Repressive Scenario

- a. Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak, melakukan pengawasan, melakukan penahanan, didukung penyediaan dan personil yang lebih besar.
- b. Polisi mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi peraturan, mengambil tindakan yang berbeda dan menyampaikan keberatan.

⁴⁾ Adiansyah, Op cit, hal. 74.

- c. Melakukan pembatasan pembebasan orang – orang, infiltrasi kedalam kelompok pembuatan pembuat kerusuhan, pembangkang dan tidak mematuhi aturan, melakukan peningkatan, pembuat provokasi dan perbuatan perbuatan ilegal.
- d. Polisi cenderung konservatif, ultra konservatif, memiliki pilosofi dan sikap yang extrim.

2. *The Humanistic Scenario*

- a. Polisi yang lebih educated, professional dan humanis.
- b. Tindakan yang sifatnya penekanan atau penghancuran ditempatkan sedemikian rupa dengan menekankan usaha membantu, melayani, terbuka pada dunia lain, melihat problem kontrol sosial dan hak asasi sebagai sebagai suatu yang bersifat global dan saling berkaitan.
- c. Kekuasaan hanya digunakan sebagai suatu pertanggungjawaban moral secara pribadi, kelompok sosial dan masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari sistem sosial kontrol yang dilakukan Polisi dalam mengembangkan hidup bersama secara kekeluargaan.

- d. Polisi adalah sosok manusia yang hangat dalam pergaulan, terpercaya dan mudah didekati serta selalu terbuka untuk menerima semua pengaduan dan permintaan bantuan dari orang yang lemah, bodoh, frustrasi dan kebingungan, tidak mempunyai pekerjaan, kelaparan, sakit, kesepian dan putus asa.

Wewenang dari Polisi dinyatakan secara yuridis dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan :

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan ;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan ;

- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian ;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan , kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pangamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Melaksanakan kewenangan lain termasuk lingkup tugas kepolisian .

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Undang-undang no.2 tahun 2002 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan ;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan ;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan ;
- i. Menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan ;

- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa ;
- e. Menghormati hak azasi manusia.

Sebagai penyidik Polisi mempunyai wewenang (Pasal 7 KUHP) :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan yuridis tentang Polisi. Faktor ketentuan yuridis berpengaruh dalam menentukan peran, fungsi, tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh Polisi. Ketentuan – ketentuan yuridis mengenai Polisi tercantum dalam :

- (1) Undang - undang No. 2 Tahun 2002
- (2) Undang - undang No. 20 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 1 tahun 1988
- (3) Undang - undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP).

Ketentuan tersebut dalam pasal – pasalnya menyebutkan antara lain :

1. Undang - undang No. 2 Tahun 2002

Pasal 1

"Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian"

Pasal 2

" Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibiidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Pasal 4

" Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. "

2. **Undang - undang No. 20 Tahun 1982, tentang ketentuan – ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia**

Pasal 29 :

Angkatan bersenjata terdiri atas :

1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bersenjata cadangannya.
2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta cadangannya.
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara beserta cadangannya.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Undang - undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP).

Pasal 6 menyebutkan :

- (1) Penyidik adalah**
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang.**
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.**

Pasal 7 menyebutkan :

- (1).Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :**
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.**
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian**
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.**
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.**

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang - undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 9 menyebutkan :

“ Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing – masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan masing – masing.

KUHAP tersebut menegaskan bahwa Polisi adalah badan secara khusus ditunjuk sebagai penyidik. Konstalasi normatif dan alokasi kekuasaan seperti itu menumbuhkan semacam monopoli kewenangan yang hanya ada di tangan Polisi, kecuali pada kejahatan tertentu, seperti dengan adanya ketentuan dalam Pasal 6 ayat 2.

Hubungan antara polisi dengan badan – badan lain itu diatur dalam putusan Presiden No. 372 Tahun 1962. Pasal 1 Keppres tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat – alat kepolisian khusus dari instansi / jawatan sipil ialah alat – alat atau badan – badan sipil pemerintah yang oleh kuasa Undang - undang diberi wewenang untuk melakukan tugas – tugas kepolisian di bidangnya masing – masing. Pasal 4 Keppres tersebut menyatakan bahwa Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian dapat memberikan petunjuk – petunjuk teknis kepolisian kepada alat – alat kepolisian khusus melalui pimpinan

masing-masing dan petunjuk itu harus ditaati oleh kepolisian khusus yang bersangkutan.

Dari perincian ketentuan yuridis Polisi seperti yang dikemukakan di atas, terlihat upaya penegakan hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara materiil. Upaya penegakan hukum secara materiil, khususnya yang dilakukan oleh Polisi dikuatkan dengan dikeluarkannya SK Kapolri No. Polisi : SKEP / 433 / XI / 1985 yang menetapkan penggunaan " Buku saku Pengetahuan Dasar Bagi Anggota Polri di lapangan. Dalam buku saku ini antara lain dimuat tentang pedoman landasan mental sikap dan perilaku Polisi di lapangan.

B. Polisi Pada Posisi Hukum dan Sosial

Studi mengenai kepolisian selalu menampilkan Polisi sebagai sosok masyarakat yang tugasnya mencari dan menangani kejahatan. Saat kita menyebut kata Polisi maka terlintas dalam bayangan kita kejadian perampokan, pembunuhan, pencurian dan kejadian-kejadian kriminal yang lain, sehingga bayangan yang ada, Polisi adalah petugas yang terus – menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan kasus – kasus kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan. Istilah polisi menjadi penting disebabkan oleh

kedudukan dan peranan yang mewujudkan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, kestabilan dan ketertiban sosial. Polisi selalu hadir untuk mengiringi dinamika perubahan masyarakat dan mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya. Polisi selain sebagai pemburu kejahatan juga dituntut menjadi petugas yang menjalankan fungsi sosial. Potret Polisi juga berkembang hingga mencakup bagaimana tugas Polisi melihat diri mereka sendiri dalam menunaikan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan secara sekaligus mengaitkannya dengan nilai – nilai manusiawi yang dijunjung secara universal.

Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan Polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya – tidaknya di bidang hukum pidana. Pekerjaan Kepolisian adalah pekerjaan menarik. Ia menjadi menarik karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Apabila hukum itu bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, Polisi itulah yang akan menentukan secara konkrit siapa – siapa yang harus ditundukkan, siapa – siapa yang harus dilindungi dan

seterusnya. Melalui Polisi itulah hal – hal yang bersifat falsafi dalam hukum dapat ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Tetapi justru oleh karena sifat pekerjaan yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya ⁵⁾.

Selanjutnya ditambahkan pandangan tentang Polisi oleh. Satjipto Rahardjo, bahwa mempelajari Kepolisian secara normatif tidak saja memberikan gambaran yang seharusnya sangat kaya dengan realitas perilaku. Dengan perkataan lain, kita tidak dapat memperoleh gambaran yang lengkap dan benar mengenai dunia Kepolisian tanpa melakukan kajian sosiologis.

Masalah Kepolisian akan tampak jelas pada tataran kultural. Ciri khas yang menonjol dan sekaligus merupakan problem Kepolisian adalah ambiguitas kelembagaan yang tampak dalam tuntutan peran, sedangkan kapasitas yang tersedia sangat minim. Belum lagi mitos bahwa Polisi adalah mereka yang mewakili fungsi kekuatan dengan tugas mengadakan batasan rambu dan pengawasan. Sedangkan kejujuran dan keteguhan fungsi itu semakin diganggu oleh faktor seperti : egoisme kekuasaan, kenikmatan subyektif untuk mengatur

⁵⁾ Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru , Bandung, hal. 95.

orang lain, maupun terkooptasinya tugas Kepolisian oleh sistem dan jaringan kekuasaan yang lebih makro ⁶⁾.

Pada negara maju sering terlihat Polisi terposisikan menjadi sosok penuh curiga dan sosok itu kadang berperan sebagai centeng kelas manusia kaya, sebagai tukang backing bagi perjudian :

Hal ini disebabkan oleh tuntutan dan kapasitas yang tidakimbang.

Polisi diminta agar turut serta melakukan pekerjaan sosial selain fungsinya sebagai penegak hukum. Peran itu akan dapat terbangun sempurna apabila kelembagaan Polisi diterima sepenuhnya, artinya kendala dan kelemahan yang ada harus dipecahkan.

Belum optimalnya operasional Kepolisian RI saat ini disebabkan adanya beberapa kelemahan yang belum dapat diantisipasi dengan baik, antara lain yaitu :

- a. POLRI semakin kehilangan jati dirinya sebagai pengemban fungsi intelejen yang handal. Ini terlihat dari lemahnya POLRI dalam melakukan deteksi diri terhadap berbagai gangguan ketertiban.

⁶⁾ Adiansyah, Op cit, hal. 75

- b. POLRI kehilangan daya greget ketanggap segeraannya dalam menangkai problema kantibmas sejak masih embryonal, baik yang berwujud *Police Hazard* maupun kriminogennya yang potensial berkembang secara nyata (faktual).
- c. Belum memadainya mutu profesionalisme Kepolisian di tubuh POLRI, terutama bila dihadapkan pada tugas – tugas pokoknya nyaris mengabaikan jati dirinya sebagai penyelidik tunggal dan sebagai penyidik utama di republik ini. Kurangnya profesionalisme ini mengakibatkan POLRI sering tampak ragu – ragu dalam bertindak. Pada hal semestinya profesionalisme ini sangat melekat pada fungsi dan tugas Kepolisian.
- d. Lemahnya mutu dan kemampuan manajerial POLRI, terutama pada eselon bawah (*Low manager*) pada Kapolsek. Akibatnya lemah dalam proses pengambilan keputusan, dan lemah dalam mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi termasuk dalam menempatkan skala prioritas dan efektivitasnya ⁷⁾.

Dalam hal ini Polisi diminta berperan seoptimal mungkin dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun keamanan dan ketertiban itu sering dipengaruhi oleh perkembangan

⁷⁾ Anton Tabah, 1995, Peran Polri Dalam Mengantisipasi Kejahatan, Bigraf Publisng, Yogyakarta, hal. 76.

ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dari sisi tingkat kriminalitas dengan perkembangannya kejahatan dimensi baru (*new dimention of crime*) seperti kejahatan migrasi, komputer, merk, patent, dan hak cipta, penyadapan telepon serta kejahatan tersebut semakin terorganisir seperti perdagangan wanita, narkoba, trveller cheque ⁸⁾.

Banyak tugas dan peran Polisi dalam bidang hukum yang harus diinvestigasikan melalui modus sosiologis. Dilema yang timbul adalah ambivalensi dalam pekerjaan pemolisian. Ambivalensi tersebut muncul dalam bentuk berbagai manifestasinya. Kita bisa mengamati adanya aspek yang tampak resmi dan yang tersembunyi dalam dunia pemolisian. Polisi bekerja menurut peraturan. Peraturan disusun dalam rumusan yang umum sehingga cukup abstrak untuk dilaksanakan begitu saja. Polisi mesti melakukan interpretasi terlebih dahulu, sehingga bisa dikatakan Polisi mewujudkan hukum melalui perilaku. Perilaku menyimpan seribu satu macam fleksibilitas yang tidak mungkin disediakan oleh patokan – patokan peraturan. Jadi di belakang dunia peraturan, masih ada dunia perilaku.

⁸⁾ Bannurusman, 1995, Makalah Sambutan Kapolri Pada Pembukaan Seminar Nasional Kepolisian Indonesia, Undip Semarang, hal. 8.

Dilema lain yang timbul dari pemolisian, terletak permasalahan besar yang disebut sebagai orde hukum dan orde ketertiban. Perkembangan serta karakteristik tersebut menyebabkan dan mendorong kita untuk melihat keduanya, yaitu hukum dan ketertiban secara terpisah, keduanya sudah menjadi kawasan yang berbeda, karena memiliki karakteristik dan sifat – sifat yang berbeda. Dalam hukum pidana berlaku asas, bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah, sebelum datang putusan hakim.

Apabila dilihat pada latar belakang pekerjaan pemolisian. Seorang pelaku kejahatan tidak akan datang dengan sendirinya untuk minta diadili. Harus ada badan publik yang memulainya dan itu pertama – tama dilakukan oleh Polisi. Yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan. Polisi adalah hukum pidana yang hidup atau ujung tombak dari penegakan hukum pidana.

Secara sosiologis tampak bahwa prosesnya tidak sesederhana seperti skenario yang disusun oleh hukum. Ada yang namanya sosiologi penahanan. Polisi menghadapi dan mempunyai permasalahan sendiri dalam melakukan pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Menurut Prof. DR. Satjipto Rahardjo, Polisi sudah menjalankan pekerjaan multi fungsi, yaitu tidak

sebagai Polisi saja, tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Artinya sebelum Polisi memutuskan untuk menangkap seseorang, maka ia harus yakin betul bahwa orang tersebut bersalah. Hal ini karena resiko yang dihadapi tidaklah kecil, kecuali resiko hukum, seperti salah tangkap tangkap dan praperadilan, ia juga menghadapi resiko sosiologis, seperti perlawanan yang bahkan bisa mengobarkan nyawanya. Oleh karena itu Polisi tidak main – main dengan melakukan penangkapan dan penahanan itu. Dengan demikian sebelum ia memutuskan untuk bertindak, maka dalam kepalanya sudah berputar sistem peradilan pidana, yaitu menahan, memeriksa dan kemudian menghukum seseorang.

Berhadapan dengan persoalan – persoalan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Polisi sering dilihat sebagai seorang yang sehari – harinya menafsirkan hukum. Dengan menafsirkan ini, kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ketertiban bisa teratasi. Seorang Polisi misalnya tidak akan melaksanakan ketentuan hukum apabila pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Tetapi dengan adanya praktek yang demikian itu, maka terbukalah suatu sudut tersendiri dalam praktek Kepolisian yang tidak selalu sama besar yang tertera dalam perundang – undangan.

Pada hakikatnya Polisi dihadapkan kepada situasi konflik dan ia bertugas untuk mengambil keputusan di situ. Apabila pada akhirnya ia bertindak, maka pada saat itu ia telah melakukan sesuatu yang menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik itu, tetapi dengan melawan, mengalahkan, merugikan pihak lain. Pertanyaan – pertanyaan yang timbul disini berkisar pada persoalan apakah Polisi telah memikirkan benar – benar, bahwa pihak yang dikalahkan secara moral memang harus dikalahkan ?. inilah yang diatas dikatakan sebagai masalah yang tidak ada kesepakatannya. Tetapi sulit juga untuk mengharapkan, bahwa Polisi itu senantiasa akan mempertimbangkan dengan unsur – unsur segala segi dari permasalahan yang dihadapinya, terutama dari segi etis dan moral, untuk itu maka ia tidak hanya harus berbuat sebagai Polisi, melainkan juga sebagai filosof.

Untuk melaksanakan peranan Polisi yang terdapat pada order hukum dan order ketertiban, pekerjaan Polisi sering disebut menggunakan kekerasan, baik dalam konteks kekerasan bisa atau dalam konteks kekerasan dengan kekejaman (*brutally*). Kekerasan yang dilakukan oleh Polisi (*Police violence*) menurut Prof. DR. Muladi, orang cenderung untuk mempunyai konotasi negatif terlebih dahulu, tanpa

melihat kemungkinan bahwa terjadinya "*Police malpractice*" atau "*Police misconduct*" tersebut merupakan akibat dari suatu situasi.

Penggunaan kekerasan oleh Polisi merupakan perlengkapan atau sebagian dari perlengkapan untuk bisa menyalurkan pekerjaannya, yaitu membina dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Penggambaran dari perlengkapan itu tampak jelas pada penampilan seorang Polisi apabila penampilan itu bisa diumpamakan sebagai lambang, maka pekerjaan Kepolisian itu sudah dilambangkan melalui berbagai perlengkapan yang melekat pada seseorang Polisi, seperti pentungan, pistol dan borgol. Semua alat perlengkapan ini tentunya mendorong kita untuk cenderung berfikir ke arah penggunaan kekerasan dan dengan demikian melihat pekerjaan Polisi itu sebagai suatu pekerjaan untuk membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya.

Adapun patokan yang dipakai menilai kekerasan telah digunakan secara tidak sesuai pada tempatnya, adalah:

- a. Apabila seorang Polisi menyerang secara fisik dan kemudian gagal untuk melakukan penahanan, penggunaan kekerasan yang wajar diikuti oleh penahanan.

- b. Apabila seorang warga negara yang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan baik dengan perbuatan maupun kata – kata, kekerasan hanya digunakan jalan diperlukan untuk melakukan penahanan.
- c. Apabila seorang Polisi, sekalipun waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahanan masih bisa dengan mudah diatasi melalui cara – cara lain.
- d. Apabila sejumlah banyak Polisi ada disitu dan bisa membantu dengan cara menggiring, warga negara bersangkutan ke kantor, tempat penahanan atau kamar – kamar interogasi.
- e. Apabila seseorang yang ditahan itu diborgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dan kekerasan.

Disamping itu penyalahgunaan wewenang itu terdapat dalam wilayah – wilayah dikuasai oleh hukum acara dengan ketat, dalam ragam jaminan terhadap keseimbangan kekuasaan negara dan hak – hak individual. Disinilah seringkali terjadi dakwaan adanya "***gross-violation of human rights***" seperti penyiksaan, penahanan secara tidak sah, penganiayaan menimbulkan kematian, perlakuan terhadap tersangka anak – anak dianggap tidak sah serta hal – hal yang berkaitan

dengan " *code of conduct* ", misalnya prosedur penggunaan kekerasan termasuk penggunaan senjata api.

Pembicaraan mengenai masalah penggunaan kekerasan yang erat hubungannya dengan pekerjaan Kepolisian dan dengan sendirinya harus terlibat pada kepribadian Polisi. Kepribadian merupakan suatu beban itu menentukan hubungannya dengan masyarakat disekelilingnya. Polisi misalnya, maka beban teknis pekerjaannya akan menentukan bentuk – bentuk hubungan sosial dengan masyarakat umum. Polisi menjalin suatu pola hubungan yang istimewa, yaitu di satu pihak ia mempunyai kewajiban untuk melayaninya, sedangkan dipihak lain, ia melayani masyarakat itu dengan cara yang berlawanan dengan prinsip pelayanan yakni mendisiplinkannya. Polisi harus mengabdikan pada masyarakat dan sekaligus menghadapinya, melawannya. Dari situ timbul tanggapan, bahwa Polisi merupakan musuh dari umum dan bahwa ia selalu merasakan berada dalam suasana konflik dengan masyarakat.

Skolnick ⁹⁾ melihat persoalan tersebut dari segi lingkungan pekerjaan Polisi dengan masyarakat yang diperinci sebagai lingkungan

⁹⁾ Muladi, 1995, Polisi dan Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Kepolisian Undip Semarang, hal. 10.

ke dalam ; bahaya, kekuasaan dan efisiensi. Dengan adanya faktor – faktor bahaya yang membayangi pekerjaannya, menyebabkan ia sangat menaruh perhatian terhadap tanda – tanda yang menunjukkan adanya suatu potensi akan adanya kekerasan atau pelanggaran hukum. Unsur bahaya itu menyebabkan ia terisolasi secara sosial.

Berhadapan dengan ancaman bahaya tersebut, Polisi mengembangkan suatu persepsi sendiri terhadap masyarakat yang dilayaninya. Efisiensi menghendaki, bahwa ia mengidentifikasi kelompok-kelompok orang – orang tertentu sebagai lambang – lambang dari pemberontak, pembangkang atau orang – orang yang suka menggunakan kekerasan. Polisi akan memberikan reaksi terhadap petunjuk – petunjuk akan adanya suatu bahaya, bagaimanapun samar – samarnya petunjuk tersebut. Petunjuk – petunjuk tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Hindarilah selalu bersikap curiga.
- b. Perhatikan hal – hal yang tidak lazim
 1. Adanya orang – orang ditempat – tempat yang bukan semestinya ada disitu.
 2. Mobil – mobil yang tampak tidak beres

3. Toko – toko dan perusahaan yang buka jam – jam yang tidak semestinya.
- c. Orang yang harus menjadi sasaran penahanan di lapangan
1. Orang – orang yang mencurigakan, yang dikenal oleh Polisi dari penahanan – penahanan terdahulu dari pengamatan.
 2. Tampak alkoholik dan narkotik yang sewaktu – waktu akan melakukan kejahatan untuk bisa membayar kecanduannya.
 3. Orang yang memenuhi ciri – ciri yang digambarkan sebagai orang yang dicari oleh radio, surat kabar dan lainnya.
 4. Setiap orang yang dilihat ada disekitar kejadian kejahatan yang baru saja dilaporkan kejadiannya.
 5. Para pembuat kerusuhan yang sudah dikenal yang berada dekat kerumunan.
 6. Orang – orang yang mencoba untuk menghindar dari Polisi.
 7. Orang yang menunjukkan sikap aneh tidak acuh secara berlebihan pada waktu berhubungan dengan Polisi
 8. Tampak sekali gemetar pada waktu berhadapan dengan Polisi
 9. Wanita – wanita atau gadis – gadis yang tidak dikawal yang berada ditempat – tempat umum, terutama pada malam hari seperti di bar – bar, bis sudut jalan dan sebagainya.

10. Orang – orang yang bercintaan di daerah industri (mereka ini bisa sedang mengamati).
11. Orang yang luntang lantung di tempat – tempat anak – anak bermain
12. Orang – orang yang menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah atau yang menawarkan jasa – jasa di sekitar tempat tinggal.
13. Peluntang – lantung di sekitar WC Umum
14. Laki – laki yang sendirian duduk di dalam mobil dengan surat kabar atau buku dipangkuannya
15. Laki – laki yang duduk sendirian di dalam mobil dan yang mengamati wanita – wanita secara berlebihan, kadang – kadang memanipulasi kaca spion untuk menghindari kontak mata yang langsung.
16. Orang – orang yang menunggu lift (tumpangan)
17. Orang – orang yang menggunakan mantel pada waktu panas
18. Mobil dengan tutup roda tidak cocok atau mobil keluar dengan plat nomor yang bersih atau kebalikannya.

19. Pekerja – pekerja pengantar barang yang beruniform, tetapi tanpa membawa barang atau tanpa membawa truck untuk mengangkut barang.

C. Pengertian Diskresi Polisi

Diskresi yang dilakukan oleh Polisi, mempunyai latar belakang yang jauh, tetapi mempunyai nilai fundamental dalam kehidupan hukum pada umumnya. Yang dimaksudkan dengan latar belakang yang jauh itu adalah pada saat kita membicarakan antara hukum dan ketertiban. Pada saat membicarakan keduanya, sesungguhnya bisa saling bertolak belakang, oleh karena tuntutan masing – masing berbeda. Hukum merupakan lambang dari kepastian yang didasarkan pada peraturan, sedangkan ketertiban tidak perlu menghiraukan apakah hukum sudah dijalankan ataukah belum. Pemberian deskresi pada hakekatnya bertentangan prinsip – prinsip negara yang berdasarkan hukum. Deskresi ini menghilangkan kepastian tentang apa yang terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan tercapai. disini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan di atur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak akan dapat dicapai. Setiap

petugas Kepolisian sangat penting mengambil keputusan dalam sistem peradilan pidana. Polisi menggunakan diskresi pada saat mengambil keputusan yang kritis dan pada saat penggunaan kekuatan yang mematikan (senjata). Apakah pada waktu memutuskan untuk menahan atau tidak menahan seseorang.

Pengertian diskresi menurut Kenneth Culp Davis ¹⁰⁾ mempunyai beberapa unsur, antara lain : (1). Petugas hukum pidana, (2). Perbuatan dalam suatu kapasitas sebagai petugas, (3). Membuat suatu keputusan atau dasar keputusan pribadi. Setiap keputusan yang diambil oleh Polisi mempengaruhi kehidupan dan kebebasan dari warga negara dan didasarkan pada pengalaman, latihan atau adanya hubungan politik. Diskresi Polisi adalah tidak tak terbatas. Seorang petugas Polisi tidak bebas menggunakan ketentuan hukum untuk menangkap, menahan atau menembak seseorang di dalam suatu keadaan tertentu.

Langkah – langkah yang harus dipenuhi oleh seorang Polisi dalam melakukan diskresi adalah sebagai berikut :

- 1) Menghentikan dan menggeledah seseorang, (menyuruh berhenti seseorang), diskresi yang dilakukan adalah tidak melaksanakan tugas tersebut.

¹⁰⁾ Samuel Walker, 1992, *The Police in America, An Introduction*, Second Edition, Mc Graw-Hill, Inc .USA., 198.

- 2) Membuat dan menulis laporan tentang kejahatan seseorang, diskresi yang dilakukan adalah tidak membuat laporan sama sekali.
- 3) Menahan dan menangkap seseorang, diskresi yang dilaksanakan adalah memberi nasehat tanpa menahan, memberikan pertimbangan tanpa menangkap menyatakan sesuatu yang terlarang untuk dilakukan.
- 4) Membuat laporan tentang penyidikan, diskresi yang dilakukan dalam keadaan ini adalah menghentikan penyidikan.

Dalam melaksanakan diskresi Polisi terhadap hukum dan ketertiban sering terjadi dilema antara kekuatan itu, dimana Skolnick melihat pertentangan antara hukum dan ketertiban dalam kerangka kerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum tidak hanya merupakan alat dari ketertiban (*order*), melainkan lebih sering bertentangan dengan ketertiban itu sendiri ¹¹⁾.

Chambliss dan Siedman juga membicarakan masalah pertentangan antara hukum dan ketertiban. Mereka berpendapat bahwa suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum adalah suatu

¹¹⁾ Skolnick, Jerome 1966 *Justice Without Trial* John Wiley & Sons Inc New York, London, Sydney

ideal yang tidak dapat dicapai¹²⁾. Yang dimaksud peraturan secara murni itu adalah dalam arti, bahwa seluruh masyarakat diatur dalam hukum yang dirumuskan secara jelas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh pejabat dalam penerapannya. Keadaan atau ideal yang demikian itu sama tidak mungkinnya dengan suatu masyarakat yang didasarkan semata – mata pada kebebasan, kelonggaran atau diskresi yang dipunyai oleh para penegak hukumnya.

Ketertiban hukum yang murni itu dipakai sebagai penggambaran dari hukum, sedangkan diskresi menggambarkan ketertiban sekalipun diskresi itu tidak dapat sama sekali dihindari namun ia dapat dibatasi. Suatu kompromi antar keduanya diperoleh melalui dua perangkat kaidah yang saling mengisi yaitu : (1). Kaidah hukum pidana substansial, dan (2). Hukum acara pidana. Kaidah yang pertama berisi ketentuan – ketentuan yang harus dijalankan oleh para penegak hukum (sinonim dari ketertiban) dan yang lain menentukan batas – batas yang harus diindahkan oleh para penegak hukum dalam memperlakukan warga negaranya (sinonim dari hukum).

¹²⁾ Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, hal. 75.

Persoalan – persoalan yang timbul dalam penerapan diskresi oleh Polisi, baik itu terhadap hukum maupun ketertiban serta adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan diskresi oleh Polisi. Samuel Walker mengungkapkan sebagai berikut : Banyak dari masalah – masalah yang sangat penting pada tubuh Polisi menghasilkan diskresi yang tidak terkontrol. Itu terutama sekali dihubungkan dengan lima aspek dari sistem penegakan hukum antara lain :

1. Bertentangan dengan *due process*

Standar kerja dari *due process* membutuhkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi peradilan kriminal adalah dengan dasar kebenaran dan diatur oleh prosedur yang resmi. Ketika seorang Polisi melakukan penembakan atau mengakibatkan matinya seseorang dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Polisi, maka ia telah bertindak sebagai hakim dan sebagai penuntut umum dan sekaligus sebagai eksekutor. *Due process* sering memintakan bahwa seorang petugas mempunyai banyak alasan yang standar untuk mengganggu ketenangan hidup seseorang. Banyak Polisi bertindak diluar jalur hukum, seperti melindungi

pelacuran, mucikari serta menangkap seseorang dengan taktik yang berbeda dengan standar yang diatur dalam penangkapan.

2. *Bertentangan dengan perlindungan hukum yang sama*

Walker mengilustrasikan dengan sistem hukum Amerika dari konstitusi Amandement ke 40 tentang prinsip persamaan, dimana konstitusi itu menjamin perlindungan hukum terhadap semua warga negara. Setiap keputusan untuk melaksanakan diskresi yang melahirkan penyimpangan adalah bertentangan dengan prinsip konstitusi ini sebagai contoh Polisi melakukan penangkapan terhadap orang kulit hitam sedangkan kejahatan ini sama – sama dilakukan oleh kulit hitam dan kulit putih.

3. *Masalah hubungan antara Polisi dan masyarakat*

Perihal penangkapan dan ditambah lagi bilamana terjadi baku tembak dengan warga negara, bahwa sering terjadi diskriminasi terhadap golongan minoritas atau ada suatu perasaan tentang terjadi diskriminasi dalam pengambilan keputusan diskresi itu. Hal ini akan menambah permasalahan tentang hubungan antara Polisi dengan masyarakat.

4. *Manajemen perorangan yang jelek*

Untuk mengevaluasi secara sederhana petugas Polisi administrator Polisi banyak membuat hal – hal yang baik tetapi mereka mengetahui bahwa mereka diharapkan untuk menangani setiap situasi yang berbeda. Jika hal itu tidak bisa dituntaskan, maka Polisi dapat dinyatakan melaksanakan tugas diskresi tidak terkontrol secara penuh. Permasalahan tersebut sangat sulit jika tidak dirahasiakan untuk membuat pengertian yang bisa diterima sebagai suatu pertimbangan tentang watak kerja seorang Polisi.

5. *Kerangka kerja Polisi yang tidak efektif*

Untuk membawa diskresi kedalam suatu kebijakan penegakan hukum. Hal ini dibutuhkan mengontrol tingkah laku par apetugas yang membuat diskresi di jalanan sebagai penjelasan kebijakan tersebut dalam praktek. Jika seorang Polisi yang melakukan diskresi tidak melakukan bimbingan atau pengawasan tidak bisa dijamin bahwa Polisi tersebut telah melaksanakan kebijakan itu.

Disamping adanya masalah – masalah yang berhubungan dengan diskresi, juga terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi Polisi, antara lain :

1. Faktor situasi
2. Seputar lingkungan pekerjaan
3. Kebijakan yang dilakukan dalam Kepolisian
4. Banyaknya ciri – ciri diskresi dihubungkan dengan karakter individu Polisi.

Ad 1. Faktor – faktor situasi

Diskresi Polisi sering dipengaruhi oleh keadaan dari tiap – tiap situasi kejahatan. Kesempatan untuk menangkap, sebagai contoh, dibuatnya suatu kejahatan tersebut menjadi serius, sehingga kesempatan untuk menangkap seseorang yang dicurigai menjadi terbuka, walaupun bukti belum ada, apalagi didorong oleh bukti yang kuat, adanya korban, hubungan secara nyata antara koeban dengan orang yang dicurigai, sikap dari orang yang dicurigai, pengaruh moral terhadap keadaan korban.

Ad 2. Seputar lingkungan pekerjaan

Karakteristik yang paling menonjol dari diskresi Polisi pada suatu peristiwa kejahatan tempat atau situasi dimana peristiwa itu terjadi. Polisi sering bertugas menggunakan senjata pada

daerah kelas atas (*Higher crime areas*), karena kelas atas tersebut mempunyai banyak kejadian dan kadangkala harus menggunakan kekuatan yang mematikan untuk menanggapi kejadian itu.

Ad 3. Kebijakan yang dilakukan dalam korps Kepolisian

Keputusan lembaga mempunyai pengaruh terhadap diskresi Polisi yang dilakukan secara berlebihan. Membuat laporan tentang keputusan – keputusan yang diambil oleh lembaga Pemolisian akan membawa pengaruh yang kuat terhadap diskresi Polisi dan itu menarik untuk dibicarakan sampai ke persoalan – persoalan yang sekecil – kecilnya.

Ad 4. Karakteristik individu petugas

Sebaiknya untuk dapat mempunyai keyakinan secara umum. Karakteristik dari individu para petugas Polisi janganlah hendaknya mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kebiasaannya, seperti ras, pendidikan, janganlah menjadi faktor penentu untuk membuat suatu keputusan.¹³⁾

¹³⁾ Samuel Walker, Op cit, hal. 204-207.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan yang dikuasai oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang dalam Penyelesaian Kasus-kasus Asusila.

1. Teknik dan Taktik Penyidikan oleh Polisi

Keterkaitan penyidik dalam Perundang – undangan sangat penting, terutama asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Adapun asas tersebut antara lain :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang – undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang – Undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang - Undang dan atas kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan pejabat penegak hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata - mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seseorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum .

Pemerintah telah membuat peraturan perundangan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai perwujudan asas perlindungan harkat martabat manusia. Pasal 1 butir 10 Undang - Undang Kepolisian menyebutkan :

" Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan ".

Pasal 2 menyebutkan ;

"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Pasal 1 butir 13 juga memuat ketentuan tentang penyidikan :

" Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ".

Dalam rangka menyelenggarakan kewajibannya sebagai penyidik mempunyai wewenang untuk :

- Menerima laporan dan pengaduan.
- Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- Demi kepentingan umum dapat memaksa orang agar menuruti perintah dan petunjuk – petunjuknya.
- Mencari keterangan dan bukti.

- Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- Untuk kepentingan penyidikan melarang setiap orang meninggalkan tempat kejadian perkara.
- Membawa dan menghadapkan seseorang dalam rangka penyidikan perkara pidana.
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat dalam rangka penyidikan perkara pidana.
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sesuai dengan hukum acara pidana.
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- Mengadakan penghentian penyidikan.

Undang - Undang juga mengatur dengan tegas, siapa yang berwenang melakukan penyidikan dan yang berstatus sebagai penyidik. Perhatikan bunyi Pasal 1 KUHAP :

- (1) Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini untuk mencari

dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

(3) Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang - Undang ini.

Penyidik dan penyidik pembantu harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Berpendidikan serendah - rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk penyidik dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk penyidik pembantu.
- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik fisik maupun psikis untuk melakukan tugas penyidikan.
- c. Berkelakuan baik.¹⁾

Langkah - langkah keterkaitan penyidik dalam melaksanakan tugas dengan Undang - Undang, selalu memberikan warna dan tanggung jawab terhadap upaya penyidikan. Upaya penyidikan dalam hal ini antara lain, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan

¹⁾ Soesilo R ,1980 , Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara kriminal , Politeia, Bogor ,hal 20.

surat. Keterkaitan penyidik dengan Undang - Undang dalam melaksanakan upaya paksa tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut dimulai dari :

1. Surat Panggilan

Diatur dalam Pasal 112 KUHAP, 119 dan 227 KUHAP

- Pasal 112 KUHAP :

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk dibawa kepadanya.

- Pasal 119 KUHAP :

" Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut ".

- **Pasal 227 KUHP :**

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat – lambatya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.**
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut, harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menanda tangani maka petugas harus mencatat alasan – alasannya.**
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat**

pengumuman Kantor Pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Logikanya Pasal – pasal tersebut di atas adalah pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, tidak dapat dilakukan secara tidak resmi. Prosedur pemanggilan telah diatur sedemikian rupa dan harus dipatuhi oleh tersangka atau saksi – saksi serta pejabat yang melakukan pemanggilan.

2. Penangkapan

Ada beberapa butir pasal yang perlu menjadi perhatian secara yuridis dalam hal melakukan penangkapan, walaupun wewenang ada pada penyidik (Pasal 16 ayat (2) KUHP). Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP). Penangkapan yang dilakukan harus melalui prosedur – prosedur yang antara lain :

1. Surat perintah penangkapan, yang dalam surat perintah tersebut mencantumkan nama tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan serta tempat tersangka diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan, dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Dengan syarat penangkap harus menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik.

3. Surat perintah harus mempunyai tembusan kepada keluarga orang yang ditangkap { Pasal 18 ayat (3) KUHAP }.

Logikanya pasal 18 tersebut merupakan penghargaan terhadap hak – hak asasi manusia, sekalipun yang akan ditangkap akan dibatasi kebebasan dan kemerdekaannya, namun segala sesuatu hanya dapat dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penahanan

Dasar hukum yang dipakai oleh penyidik untuk melakukan penahanan adalah Pasal 20 ayat (1) KUHAP, tetapi ketentuan pasal itu saja belum cukup, masih harus memenuhi unsur dan syarat – syarat lain sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang { Pasal 21 ayat (1) KUHAP } yang antara lain :

- Adanya bukti yang cukup
- Ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri
- Tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- Tersangka akan mengulangi tindak pidana

Selain ketentuan di atas disyaratkan juga bahwa penahanan dengan bukti tertulis yakni Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka yaitu : ²⁾

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat / tanggal lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Kewarga Negara :
 Agama :
 Uraian Perkara Kejahatan :

Lebih penting diperhatikan oleh penyidik dalam hal penahanan adalah Pasal 21 ayat (4) KUHAP, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan tersangka atau terdakwa yang disangka melakukan :

1. Tindak pidana
2. Percobaan
3. Memberikan bantuan

²⁾ Bawengan GW,1978 ,Penyidikan Perkara pidana dan Teknik Interograsi, Pradnya Paramita, hal 78

4. Penggeledahan

Penggeledahan menurut ketentuan KUHAP dibedakan antara penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 butir 17 menyebutkan : Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – undang, Pasal 1 butir 18 menyebutkan :

“ Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita ”.

Untuk kepentingan penyidikan tersebut, penyidik harus memenuhi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yuridis yang antara lain :

- Penggeledahan rumah harus melalui surat izin Ketua Pengadilan setempat { Pasal 33 ayat (1) KUHAP }.
- Petugas Kepolisian selain penyidik dapat memasuki rumah, atas perintah tertulis dari penyidik { Pasal 33 ayat (2) KUHAP }.
- Harus ada saksi dua orang.
- Kecuali hal mendesak.
- Tidak diperkenankan memeriksa buku atau menyita surat, buku atau tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan

dengan tindak pidana yang bersangkutan {Pasal 34 ayat (2) KUHP}.

- Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian / badan termasuk benda yang dibawanya serta { Pasal 37 ayat (2) KUHP}.

5. Penyitaan dan pemeriksaan surat

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan negeri setempat { Pasal 38 ayat (1) KUHP}, kecuali dalam hal mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan, hanya terhadap benda bergerak dan wajib segera melaporkannya kepada ketua pengadilan setempat { Pasal 38 ayat (2) KUHP }.

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang menghalang – halangi penyidikan.
- d. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Dalam hal pemeriksaan surat, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang diterima melalui Kantor Pos { Pasal 47 ayat (1) KUHP }.

Melaksanakan penegakan hukum oleh Polisi, bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi merupakan pekerjaan yang sulit, berbahaya dan berisiko tinggi. Mereka berhadapan dengan orang yang menurut hukum dianggap melakukan kejahatan (penjahat). Untuk itu penyidik harus mempunyai standar kerja dan etika kerja dalam melakukan penegakan hukum (*Professional Standard and Professional Ethics*). Salah satunya teknik dan taktik penyidikan. Teknik dan taktik penyidikan yang dilakukan oleh Polisi mempunyai langkah – langkah yang wajib dipergunakan penyidik dalam melakukan upaya paksa; karena alasan – alasan tersebut di atas atau perlu diketahui penyidik tentang teknik dan taktik penyidikan sebelum melakukan tugas upaya paksa dalam praktek. Perlu kiranya dengan secara singkat tapi menyeluruh dengan tujuan yang dilakukan penyidik di lapangan ada sinkronisasi dan korelasinya antara ketentuan yang ada dalam KUHP dengan teknik dan taktik yang dipergunakan oleh penyidik dalam praktek dapat diketahui. Sebagai langkah – langkah awal dari teknik dan taktik penyidikan haruslah diperhatikan tentang :

1. Persiapan peralatan untuk penyidikan antara lain :
 - a. alat – alat praktek
 - b. tape recorder
 - c. alat untuk sidik jari
 - d. lampu

- e. alat pengukur
- f. alat untuk mencetak
- 2. Pengamatan bekas – bekas peristiwa
- 3. Pemberitahuan peristiwa
- 4. Penutupan dan penjagaan tempat peristiwa
- 5. Mengadakan pemeriksaan di tempat peristiwa ³⁾

Selanjutnya setelah berada di lapangan menurut **Charles E. O'hara** dalam bukunya ***Fundamental of Criminal Investigation***, menyebutkan tentang langkah – langkah penyidikan sebagai berikut :

- 1. Identifikasi dan bila perlu melakukan penahanan untuk keperluan pemeriksaan.
- 2. Menentukan siapa pelakunya dengan cara tanya jawab atau segera mengadakan observasi bila identifikasi telah jelas.
- 3. Menahan orang – orang tertentu yang ternyata hadir pada peristiwa tersebut.
- 4. Menunjuk asisten jika perlu.
- 5. Mengamankan tempat kejadian perkara.
- 6. Hanya mengizinkan orang – orang tertentu untuk memasuki TKP.

³⁾ Sudjono D , 1976 , Kriminalistik Ilmu forensik, PT Tribisana Karya Bandung, hal 40-45.

7. Meneliti saksi – saksi dan memisahkan agar tidak berhubungan antara satu dengan yang lain.
8. Jangan menyentuh atau memindahkan barang obyek penyidikan.
9. Tentukan tugas – tugas penelitian bila ada asisten. ⁴⁾

Penyidikan perkara kriminal adalah mencari yang melakukan tindak pidana. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang berbakat dan berpengetahuan teknis yang cukup. Kalau tidak dengan demikian tidak akan berhasil.

Pada hakekatnya mencari pembuat kejahatan yang belum terang sama saja memecahkan permasalahan ilmu pasti atau teknik dan taktik dalam main catur, dimana dibutuhkan ketajaman otak. Begitu pula mencari dan menemukan penjahat, penyidik harus memiliki sifat – sifat seperti :

1. Daya memikir dengan logis.

Memikir dengan logis adalah memikir dengan dasar kombinasi dan deduksi atau induksi dan analisa.

2. Daya melihat dengan tajam.

Untuk mendapatkan gambaran tepat dan lengkap terhadap tempat, keadaan dan peristiwa yang terjadi.

3. Keuletan dalam memecahkan persoalan dan mengejar maksud. ⁵⁾

⁴⁾ Bawengan GW, Op cit, hal 31.

⁵⁾ Soesilo R, 1980, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara kriminal, Politeia Bogor, hal 58.

Teknik dan taktik penyidikan sering dilaksanakan oleh penyidik adalah pada waktu melakukan :

1. penangkapan
2. penggeledahan

ad 1. Teknik dan taktik yang dipergunakan dalam penangkapan bertujuan untuk keberhasilan tugas penangkapan, terutama dalam keadaan yang sulit. Membicarakan pada saat melakukan penangkapan, tidak selalu menguntungkan. oleh karena dalam beberapa kali tugas penangkapan, sering terjadi tertutupnya sumber keterangan atau informasi serta keadaan dan situasi yang membahayakan, kadangkala bisa menimbulkan korban bagi penyidik itu sendiri.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kekerasan dari pihak penjahat tidak dapat dihindari dan sering terjadi bentrokan fisik. Kalau seandainya penyidik yang melakukan penangkapan tidak begitu mengalami kesulitan dalam penangkapan dan penggeledahan penyidik juga selalu harus ingat :

1. Untuk mengadakan pengamanan yang perlu.
2. Untuk berhati - hati terhadap kemungkinan yang dapat membahayakan.
3. Tanpa mengurangi kewaspadaan dan penjagaan.

Dalam tugas penangkapan, penyidik akan memperoleh kemudahan, apabila ia menunjukkan sikap yang tenang, terarah dan pasti, sehingga menimbulkan keyakinan bagi orang yang ditangkap, bahwa melawan tidak ada gunanya. Di samping itu penyidik harus mahir tentang ilmu bela diri.

Untuk penjahat yang berbahaya, sebelum dilakukan penangkapan, penyidik harus mencari keterangan dan informasi terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan dan situasi si penjahat. Kerangka kerja (*Framework*) penyidik di bidang penangkapan terbagi dalam beberapa teknik dan taktik yang antara lain :

- a. Teknik dan taktik penangkapan di tempat umum.
- b. Teknik dan taktik penangkapan di dalam rumah dan sebagainya.
- c. Teknik dan taktik membawa tahanan.

Ad a. Teknik dan taktik penangkapan di tempat umum.

Penangkapan orang di tempat umum, sedapat mungkin dihindarkan. Bahaya selalu ada, apalagi dibarengi tembak – menembak, banyak kemungkinan orang tidak bersalah menjadi korban. Langkah yang paling efektif adalah membuntuti orang tersebut secara tersembunyi, bila telah berada di tempat yang sepi barulah diadakan penyergapan. Akan tetapi ada kalanya penangkapan dilakukan di tempat umum, misalnya karena terpaksa orangnya dikhawatirkan akan menghilang, atau meloncat ke kendaraan umum. Penangkapan harus dilakukan secara jitu, cepat dan

disertai pemborgolan tangan penjahat, sehingga tidak menimbulkan panik bagi masyarakat.⁶⁾

Ad b. Teknik dan taktik penangkapan di dalam rumah.

Melakukan penangkapan di dalam rumah, harus dengan sangat hati-hati dan pertimbangan yang masak. Perlu diingatkan bahwa penyidik masuk dan menyerbu ke dalam rumah. Polisi senantiasa harus memegang senjatanya dan siap untuk ditembakkan. Penyidik terlebih dahulu telah mengetahui letak rumah, posisi jalan keluar rumah, jendela – jendela rumah, situasi tersebut diperoleh melalui informasi dari informan.

Ad c. Teknik dan taktik membawa tahanan

Para petugas pengawal orang – orang tahanan harus memegang teguh pada instruksi – instruksi yang diberikan pada pengawal itu, antara lain :

- Seorang penjahat berbahaya harus dikawal paling sedikit dua orang.
- Orang tahanan dilarang bicara dengan orang lain.
- Para pengawal dilarang menerima makanan, barang atau uang dari para tahanan.
- Harus dijaga jangan sampai orang lain memberikan sesuatu pada para tahanan.

⁶⁾ Soesilo R, Op cit, hal 128.

- Para tahanan harus diborgol.
- Dijaga jangan sampai dekat dengan tahanan yang berupa senjata dan alat-alat lainnya.

Ad 2. Teknik dan taktik penggeledahan, penggeledahan badan merupakan pekerjaan sehari – hari penyidik dan dilakukan hampir dalam semua peristiwa penangkapan orang. Tujuan penggeledahan tersebut antara lain :

1. Jangan sampai waktu orang itu dibawa, sekonyong – konyong mencabut senjata dan menyerang penyidik supaya dapat melarikan diri.
2. Jangan sampai orang itu membuang barang untuk menghilangkan bukti.

Ada beberapa cara teknik dan taktik penggeledahan yang dipergunakan antara lain :

1. Jika dua orang petugas menangkap orang, orang yang akan digeledah disuruh berdiri tegak di depannya dengan kedua kakinya terbuka dan kedua tangannya diangkat ke atas. Salah seorang penyidik hendaknya menempatkan kaki kirinya diantara kaki tersangka yang terbuka, sedangkan penyidik yang lain dengan seksama memperhatikan tersangka dengan pistol siap diacungkan. Penyidik menggeledah
-

dengan tangan kiri memegang leher tersangka, sedangkan tangan kanan bebas melakukan pengeledahan.

2. Jika petugas penyidik seorang, orang yang hendak digeledah diperintahkan supaya berdiri menghadap dinding dan kaki tersangka supaya terbuka lebar dan disuruh merebahkan diri ke depan dengan kedua tangannya bersandar ke dinding. Penyidik dengan memegang senjata mendekati tersangka dari samping kiri, kemudian kaki kirinya ditempatkan diantara kedua kaki tahanan dan memulai melakukan pengeledahan.
3. Jika pengeledahan terjadi dalam sebuah rumah.
Apabila penyidik hendak memasuki rumah untuk melakukan pengeledahan terlebih dahulu memperlihatkan kepada penghuni rumah tanda penyidikanya. Setiap anggota yang bertugas harus menggunakan Tanda Lencana yang berlambang Polri, berbentuk segi empat, di atas lambang tertera tulisan Reserse dan di belakang lencana tertera nama dan pangkat penyidik. Langkah yang dilakukan oleh penyidik pada waktu pengeledahan dirumah adalah semua penghuni rumah tanpa kecuali dikumpulkan, pengeledahan dimulai, ruang demi ruang, tempat demi tempat. Jangan sekali – kali diabaikan tempat – tempat yang kiranya tidak dicapai orang, seperti loteng, di atas lemari, kursi, ranjang, laci, tempat kotor seperti WC, kandang ayam, tempat cucian, dapur dan lainnya.

4. Penggeledahan mobil

Para penumpang disuruh turun, dikumpulkan dan digeledah lebih dahulu. Kemudian mobil harus diperiksa dengan seksama, di bawah kolong mobil, tempat mesin, di bawah jok, tempat bensin dan di antara peralatan mesin

2. Teknik dan Taktik Penyidikan oleh Polisi Pamong Praja

Menelusuri keterkaitan Polisi Pamongpraja sebagai penyidik dalam Undang – Undang, menggiring kita ke dalam suatu dasar tentang dasar yuridis pembentukan Polisi Pamongpraja. Polisi Pamongpraja di bentuk berdasarkan ketentuan – ketentuan yang antara lain :

1. Undang - Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No, 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamongpraja.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamongpraja.
5. Surat Menteri Dalam Negeri No:331.1/2818/PUOD Tanggal 17 September 1999 Perihal Pembinaan polisi pamong Praja.

Untuk pembentukan Polisi Pamongpraja di Kabupaten Semarang, dasar formal yuridisnya adalah Surat Keputusan Bupati Semarang No.061/8/2002 tentang Pembentukan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.

Ketidakmapuan Polisi Pamongpraja untuk membaca dan memahami pengertian yuridis yang tercantum dalam peraturan – peraturan daerah tentang penyidikan yang dilakukan, semakin nyata (eksplisit) mengenai prosedur – prosedur penyidikan yang mereka lakukan diiringi diskriminasi individual. Diskriminasi individual dalam pengertian, bilamana dalam penangkapan, dan penggeledahan serta pemeriksaan surat Polisi Pamongpraja dihotel – hotel, losmen, pangkalan truck, maka pelaku yang tertangkap tangan diperlakukan dengan cara : WTS dikirim ke panti rehabilitasi, orang baik – baik dilepas, kalau seandainya perempuan dan laki-laki orang baik (perempuan tidak termasuk dalam identitas WTS), penyelesaian kasus dilakukan di Kantor Polisi Pamongpraja dengan membuat surat perjanjian dan sebelum pembuatan surat perjanjian tersebut, dilakukan pemanggilan terhadap kedua orang tua mereka serta pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Polisi Pamongpraja, tiada memperhatikan posisi kasus tersebut, apakah tindakan itu merupakan tindak pidana (terutama tindak pidana cabul di tempat umum) atau merupakan pelanggaran susila.

Kekuatan atau kewenangan Polisi Pamongpraja sebagai penertiban tentang Peraturan Daerah dan bertindak sebagai penyidik terdapat dalam beberapa ketentuan dan aturan – aturan pemerintah daerah

Didalam keterkaitan penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Peraturan Daerah, tindakan yang bisa dilakukan hanya terhadap tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman 6 bulan ke bawah (paling lama 6 bulan). Tiada mengurangi hak dan kewenangan Polisi Pamongpraja sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil, KUHAP memberikan isyarat dan batasan – batasan antara lain :

1. Pelaksanaan tugas penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah koordinasi penyidik Polri.
2. Dalam melaksanakan tugas wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
3. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
4. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik, ia segera menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

5. Dalam hal penghentian penyidikan, harus memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Hasil temuan penelitian melalui pengamatan atau wawancara yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Polisi Pamongpraja penuh dengan nuansa – nuansa sosiologis. Seandainya kita berpegang dan berpijak pada ketentuan – ketentuan yuridis, maka ia terjebak dalam suasana ambivalensi antara hukum dan sosial. Untuk hal ini diperlukan optik sosiologis untuk menjabarkan dan memahaminya. Dengan catatan mengungkapkan kelemahan – kelemahan dan pelaksanaan upaya paksa oleh Polisi Pamongpraja bukanlah bertujuan untuk menghakimi atau membuat suatu keputusan, tetapi sebagai dasar untuk memahami dan menjelaskan secara sosiologis peraturan – peraturan yang ditampilkan oleh Polisi Pamongpraja sebagai penyidik melalui konsep – konsep dan teori perilaku dalam ilmu sosiologi.

Analisis pendahuluan yang dapat diungkapkan adalah dengan mengadakan pendekatan secara fungsional dan secara struktural terhadap keterkaitan polisi sebagai penyidik dalam undang – undang, pada pendekatan fungsional terlihat polisi sebagai unsur sosial mempunyai kaitan dengan unsur – unsur pengawasan ketertiban peraturan – peraturan di daerah untuk membatasi perilaku – perilaku sosial masyarakat di daerah. Perkembangan tugas unsur unsur Polisi Pamongpraja menjamah sampai

memasuki wilayah kewenangan yang dipunyai oleh polisi, akan tetapi kewenangan yang dipunyai oleh polisi pamongpraja, tidak seperti perilaku kewenangan yang dilakukan oleh polisi pada umumnya.

Perkembangan perilaku tersebut telah menyimpang dari proses dan prosedur, akan tetapi sampai saat ini tiada satupun tanggapan dari masyarakat untuk mempersoalkan perilaku yang ditampilkan tersebut. Permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibatnya, akan menimbulkan perilaku penegakan hukum yang tidak mempunyai batas – batas proses dan prosedur dan bahkan penyelenggaraan penegakan membawa kecenderungan dalam mengawasi dan menertibkan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah melebihi serta melampaui bahkan di luar lembaga yang bersangkutan.

Pada pendekatan struktural, penganalisisan terlihat adanya gejala perilaku hukum di luar proses dan prosedur perilaku yang telah ditentukan oleh hukum. Gejala perilaku penegakan tersebut itmbul sebagai akibat adanya latar belakang konsep Peraturan Daerah tentang Polisi Pamongpraja yang menginginkan pemerintah mengadakan tindakan untuk memberantas segala bentuk penyimpangan perilaku susila ditempat – tempat umum, obyek – obyek rekreasi serta penginapan – penginapan di wilayah Kab Semarang. Kenyataan yang timbul dalam masyarakat adanya penegakan

hukum " gaya baru "tanpa mengikuti proses dan prosedur penyidikan yang diatur oleh konsep hukum acara pidana.

Tindakan memberikan suatu argumen penilaian, pendekatan sosiologi akan memberikan penjelasan tentang gejala – gejala perilaku yang ada dalam masyarakat. Perhatian yang utama hanyalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajari dan diteliti. Mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena – fenomena hukum yang nyata.

Berbekal Keputusan Bupati Semarang No.061/8/2002 tentang Pembentukan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang maka untuk menertibkan tempat – tempat hiburan, obyek – obyek rekreasi dan hotel – hotel serta penginapan – penginapan yang sejenis Polisi Pamongpraja melakukan razia atau penggrebekan di tempat – tempat umum, obyek – obyek rekreasi, hotel – hotel, losmen, wisma dan penginapan – penginapan. Pengamatan (observasi) terhadap tugas yang dilaksanakan oleh Polisi Pamongpraja terdapat beberapa indikasi – indikasi kelemahan dan kerancuan, antara lain :

1. Tidak adanya batas batas kewenangan yang jelas dalam peraturan bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil terutama Polisi Pamong Praja.
2. Kurang memahami manakah yang dianggap sebagai kategori tindak pidana dan manakah sebagai kategori tindak pidana ringan.

3. Tindakan yang berlebihan tanpa memperhatikan standart kerja profesional (*profesional standard ethics*), yang lazim dipakai dalam pelaksanaan upaya paksa oleh polisi seperti, penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan surat – surat.
4. Dalam melaksanakan upaya paksa, kurang memperhatikan perlindungan moral/ hak azasi manusia, terutama sekali terhadap tamu – tamu hotel melati, wisma, penginapan dan losmen.

Indikasi – indikasi kelemahan yang terakhir disebutkan di atas, memperkuat asumsi setelah diadakan wawancara tentang teknik dan taktik penyidikan yang dikuasai oleh Polisi Pamong Praja. Dari hasil wawancara dapat diuraikan :

1. Dalam melaksanakan penertiban personil ditugaskan tergantung pada berat ringannya tugas jika ringan maka cukup satu regu dengan dipimpin oleh seorang kepala regu .
2. Dari jumlah personil Polisi Pamongpraja tersebut tidak seluruhnya bertindak sebagai penyidik, sebab belum semua Polisi Pamong Praja berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

3. Sebelum petugas – petugas Polisi Pamongpraja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, para calon petugas diberikan penataran selama dua bulan, dengan materi pokok pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamongpraja, antara lain :

- a. Pancasila dan UUD 45
- b. Pengenalan hukum di Indonesia
- c. Organisasi pemerintahan daerah, wilayah dan desa
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- e. Pembinaan politik dalam negeri
- f. Pengetahuan tentang Polisi Pamongpraja
- g. Kitab Undang – undang hukum acara pidana dan Peradilan tata Usaha Negara
- h. Pengetahuan dasar kepolisian
- i. Peraturan Daerah
- j. Pembinaan teritorial
- k. Pembinaan wilayah
- l. Pembinaan mental
- m. Pembinaan rohani
- n. Etika Pemerintahan

4. Polisi Pamongpraja pernah dibekali pengetahuan dasar hukum pidana dan hukum acara pidana serta teknik dan taktik penyidikan, tetapi tidak dalam bentuk praktek, hanya pengetahuan dasar tentang materi kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, pengetahuan dasar Kepolisian serta teknik penanganan ketertiban.
5. Cara dan langkah – langkah yang pertama dilaksanakan oleh Polisi Pamongpraja dalam melakukan upaya paksa terhadap adanya laporan atau anggapan telah terjadi perbuatan asusila pada suatu tempat adalah melaporkan kepada atasan dalam hal ini kepala satuan Pol PP tentang adanya laporan atau anggapan telah terjadi perbuatan asusila di suatu tempat, kemudian dengan berbekal surat tugas dan perlengkapan peralatan yang ada langsung menuju tempat yang dicurigai untuk mengadakan penertiban, sekaligus penggerebekan.

6. Teknik dan taktik penangkapan yang dipergunakan ditempat penginapan adalah setelah sampai di tempat kejadian, memberitahukan kepada resepsionis atau manajer penginapan tersebut tentang maksud kedatangan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengadakan pemeriksaan kamar – kamar tamu, karena berdasarkan laporan masyarakat penginapan tersebut telah dipergunakan untuk berbuat maksiat. Tanpa menunggu jawaban dari resepsionis atau manajer penginapan, petugas langsung mengetuk pintu kamar tamu dan seluruh kamar di penginapan tersebut diperiksa, dan digeledah. Kamar – kamar yang terdapat pasangan manusia berlainan jenis, langsung diidentifikasi dan ditanyakan surat nikahnya, kalau seandainya pasangan tersebut mengaku sebagai suami istri. Bagi pasangan yang tidak bisa membuktikan surat – surat, dibawa dengan mobil patroli terbuka ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk diperiksa lebih lanjut. Penangkapan dan penggeledahan ditempat tempat obyek wisata dilakukan dengan cara penyergapan, sehingga banyak dari antara mereka yang tertangkap basah (tertangkap tangan). Karena tidak mengetahui adanya penggerebekan pada malam hari, mereka yang tertangkap langsung dibawa dengan mobil patroli Satuan Polisi Pamong Praja dengan disertai alat bukti.

7. Dalam melakukan penangkapan, penggeledahan serta pemeriksaan surat, sering dijumpai kasus timbulnya perlawanan dari orang yang dicurigai.
8. Langkah dan antisipasi yang harus dilakukan untuk mengatasi perlawanan tersebut adalah membawa pelaku ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, walaupun timbul unsur kekerasan dan sering dari perlawanan baik secara fisik maupun non fisik datang dari pelaku yang mempunyai kedudukan (pejabat) serta alat negara, sehingga yang dapat dibawa hanya pelaku perempuan.

Dari uraian – uraian wawancara dengan penyidik Satuan Polisi Pamong Praja tersebut terdapat perbedaan yang cukup tajam antara teknik dan taktik penyidikan yang dipergunakan oleh Polri sebagai penyidik dengan teknik dan taktik penyidikan yang dipergunakan oleh Polisi Pamongpraja, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1

**Perbedaan Teknik dan Taktik Penyidikan
Antara Polri dengan Polisi Pamongpraja**

Teknik dan Taktik Penyidikan		
No.	Polri	Polisi Pamongpraja
1.	Langkah Pertama	Langkah Pertama
	a. Membuat Surat Penangkapan lengkap dengan identitas si pelaku kecuali tertangkap tangan.	a. Surat tugas untuk penertiban
	b. Mempersiapkan peralatan : 1. Alat potret 2. Tape recorder 3. Alat Sidik Jari 4. Alat pengukur 5. Alat – alat mencetak	b. Mempersiapkan alat : 1. Pentungan karet 2. Helm 3. Senter
	c. Mempersiapkan pribadi 1. Senjata 2. Borgol 3. Pembantu penyidikan	
2.	Ditempat Kejadian	Ditempat Kejadian
	a. Penangkapan 1. Ditempat Umum, dengan teknik dan taktik jitu, cepat disertai pemborgol 2. Dalam rumah atau ruangan, teknik dan taktik, penyidik memegang senjata, siap ditembakkan 3. Membawa si pelaku	A. Penangkapan. 1. Ditempat umum : secara bersama – sama lebih kurang 15 personil, mengepung si pelaku 2. Dalam ruangan : secara bersama lebih kurang 30 personil menutup jalan keluar, termasuk pintu kamar kamar

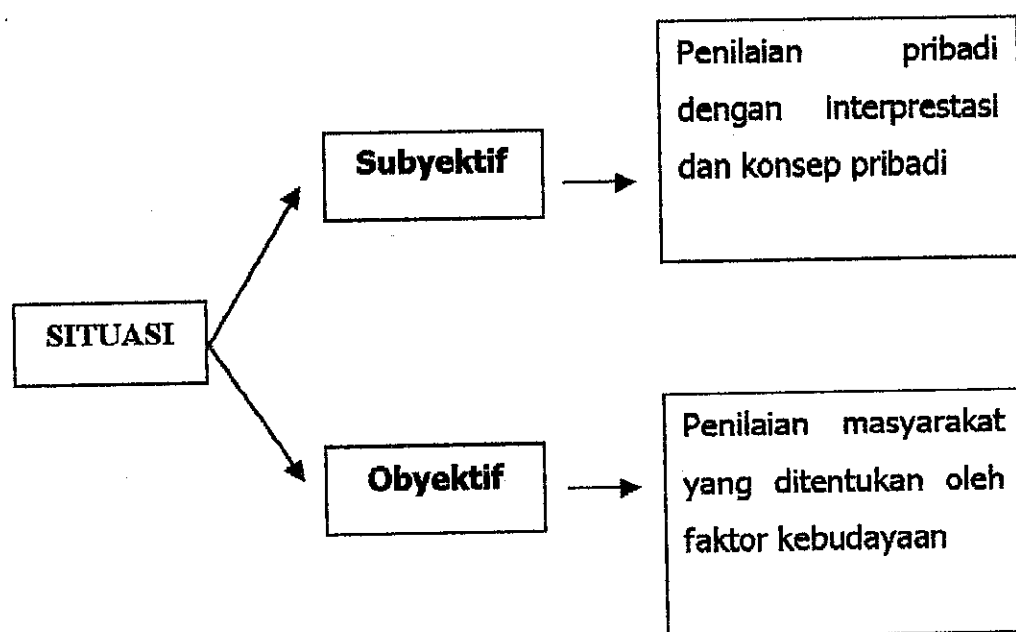
	dengan cara memberikan instruksi – instruksi kepada petugas yang membawa	<p>penginapan</p> <p>3. Membawa si pelaku, dikawal petugas Satuan Polisi Pamong Praja diatas mobil terbuka / patroli</p>
	<p>b. Penggeledahan / lengkap dengan Surat Penggeledahan</p> <p>1. Rumah / ruangan, semua penghuni dikumpulkan, ruang demi ruang diperiksa.</p> <p>2. Mobil : penumpang disuruh turun, semua bagian mobil diperiksa untuk memperoleh barang bukti</p>	<p>B. Penggeledahan</p> <p>1. Rumah / penginapan : lebih menonjolkan penangkapan si pelaku dan mengumpulkan alat bukti.</p> <p>2. Mobil : melakukan pemeriksaan terhadap apa yang terjadi di dalam mobil</p>

Sumber data : hasil wawancara dan pengamatan, diolah.

Untuk memahami persoalan tentang teknik dan taktik penyidikan oleh Polisi Pamongpraja, membutuhkan analisis yang bersifat sosiologis, dimana terdapat perbedaan yang nyata antara teknik dan taktik penyidikan oleh Polri dengan yang dipunyai oleh Polisi Pamongpraja. Dua lembaga birokrasi sebagai ujung tombak bekerjanya hukum, sama – sama memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Isu yang fundamental untuk melihat konteks permasalahan di atas adalah dengan mengadakan pendekatan sosiologis hukum, seperti yang dilontarkan oleh

Prof. DR. A.A.G. Peters. ⁷⁾ Hukum sebagai bentuk kontrol sosial dengan model Polisi pada umumnya, hukum sebagai bentuk sarana engineering sosial dengan mengambil model pemerintah dalam memandang hukum. Untuk mempertajam penjelasan, pemerintah dalam konteks pembahasan ini adalah Polisi Pamongpraja. Dua kekuatan penegak hukum yang mempunyai tujuan berbeda, sosial kontrol (diwakili oleh Polisi) dan engineering sosial (pemerintah diwakili oleh Polisi Pamongpraja).

Situasi ini membawa kita dalam dua medan arus yang berseberangan, tetapi mempunyai tugas yang sama, " ketertiban". Situasi dalam arti mempunyai penilaian pribadi dan kepentingan diri sendiri, serta penilaian tindakan manusia ditentukan oleh penilaian masyarakat. Dengan kata lain penilaian secara subyektif dan obyektif.



⁷⁾ Peters AAG, 1988 , Hukum dan Perkembangan Sosial, Sinar Harapan Jkt, XVII.

dibayangi oleh unsur sosiologis, Schuyt mengkonfigurasi ketertiban sebagai pengertian ketertiban masyarakat yang berubah – ubah, tergantung dari susunan unsur – unsurnya. Berbicara tentang ketertiban sebagai suatu yang banyak atau kurang, jadi bukan ada atau tidak ada. Pada masyarakat modern, ketertiban menonjolkan bentuk berbagai ketertiban. Ketertiban disini berdampingan dengan konflik dan ketidaktertiban.⁸⁾

Adanya kunci pembuka jalan untuk analisis tentang medan arus penegakan hukum seperti disebut di atas, akan menggiring pemahaman dan penjelasan ke arah kontrol sosial dan engineering sosial dengan muara (kunci penutup) teori tentang tindakan secara fungsional – struktural.

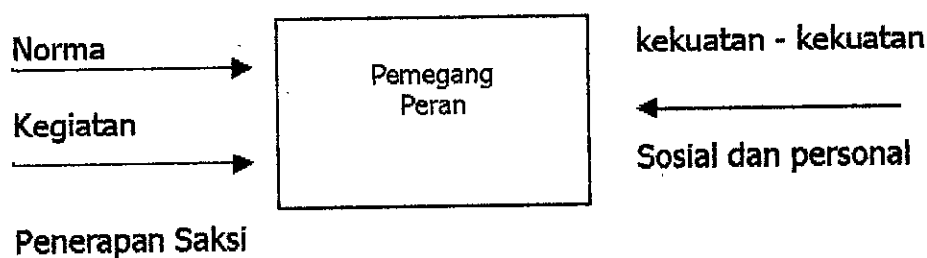
Sosial kontrol merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat – akibatnya seperti larangan – larangan, tuntutan – tuntutan dan pemberian ganti rugi, dengan lain perkataan kontrol sosial merupakan kehidupan normatif dari suatu negara beserta warga negaranya dengan gaya hukumnya.

Masing – masing gaya ini memiliki cara sendiri untuk merumuskan perbuatan yang menyimpang dan masing – masing memberikan reaksi menurut caranya sendiri – sendiri. Gaya kontrol sosial adalah gaya yang

⁸⁾ Satjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni Bandung, hal 70.

bersifat pembedaan, pemberian ganti rugi, penyembuhan (terapeutik) dan perdamaian (konsiliasi).

Berdasarkan kontrol sosial ini, bagaimanapun orang bertingkah laku sebagai pemegang peran (*Roles*) merupakan hasil penjumlahan (*Resultante*) dari semua kekuatan yaitu yang berasal dari orang (*personal force*) dan yang berasal dari masyarakat (*Societal Forces*) yang ditujukan pada pemegang peran itu. Apabila suatu peranan dalam masyarakat di atur oleh hukum, maka kekuatan sosial terpenting yang beroperasi terhadap pemegang peran adalah kegiatan dari pejabat. Chambliss dan Siedman memberikan gambaran diagram sebagai berikut : ⁹⁾



Dengan dipelajarinya hukum sebagai bentuk kontrol sosial, penegakan tindakan – tindakan adalah pada sumbangan – sumbangan hukum tentang penyelesaian pertikaian, pemeliharaan tata tertib,

⁹⁾ Ronny H. Soemitro, 1984, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru Bandung, hal 137.

perlindungan dari kejahatan dan delikueni, dengan fokus mekanisme – mekanisme sosial dari komformisme kontrol sosial merupakan dimensi dari manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan hubungan – hubungan.

Dimensi ini merupakan dimensi sosial dalam kehidupan manusia dengan unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Ketertiban
2. Sistem Sosial
3. Lembaga – lembaga Sosial
4. Pengendalian sosial (kontrol sosial)

Ketertiban merupakan suatu bkti empiris, bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bahwa manusia itu selalu didorong untuk melakukan hubungan – hubungan sosial dengan sesamanya. Jalur – jalur untuk melakukan hubungan yang demikian itu tampak dalam bentuk – bentuk yang lazim : lalu lintas, kendaraan, perdagangan, rekreasi serta perbuatan – perbuatan yang negatif, mencuri, menipu, asusila. Tetapi pengamatan kita adalah tidak tajam, apabila kita tidak sekaligus melihat juga, bahwa hubungan antara anggota – anggota masyarakat itu bukan hubungan yang kacau sifatnya. Lihat saja, betapa teraturnya lalu lintas kendaraan, demikian pada perdagangan, bisa dengan teratur tersalur kepada mereka yang membutuhkan. Sekarang diamati hubungan – hubungan sosial yang berupa pencurian, penipuan, asusila apa sebabnya, segera digolongkan pada

perbuatan yang negatif atau perbuatan menyimpang. Bukankah itu merupakan petunjuk bahwa lalu lintas sosial tidak acak – acakkan sifatnya, melainkan mengenal suatu keteraturan tertentu. Itulah sesungguhnya yang merupakan tulang punggung dari timbulnya hubungan – hubungan sosial yang bagaikan mengalir dengan tertib.¹⁰⁾

Sistem sosial merupakan pengintegrasian kepentingan – kepentingan, kebutuhan – kebutuhan orang – orang, sehingga satu sama lain terjalin ke dalam suatu pola tertentu. Cara kerja sistem sosial yang nyata sekali diantaranya dilakukan melalui pengaturan oleh tata hukum, dinyatakan secara jelas dan tegas dalam bentuk peraturan – peraturan hukum yang pada hekekatnya merupakan stereotip – stereotip hubungan antara orang – orang dalam masyarakat mengenai berbagai macam hal. Sebagaimana dirumuskan oleh E. Adonson Hoebel, maka fungsi tata hukum adalah :

1. Menetapkan hubungan – hubungan antara anggota – anggota masyarakat yang menunjukkan mana tipe – tipe perbuatan yang dibolehkan dan mana yang dilarang.
2. Mengalokasikan kekuasaan dan memerinci dengan jalan siapa yang boleh secara sah menjalankan paksaan atau siapa dan sekaligus melakukan penentuan sanksinya yang efektif.

¹⁰⁾ Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal127.

3. Penyelesaian sengketa – sengketa.
4. Mempertahankan kemampuan adaptasi dengan cara menetapkan kembali hubungan dalam masyarakat manakala keadaan berubah.¹¹⁾

Setiap sistem sosial memerlukan usaha atau cara – cara untuk mempertahankan diri. Oleh karena itu bisa dikatakan, bahwa seiring dengan adanya suatu sistem sosial, pada saat itu pula suatu sistem tersebut mengembangkan cara – caranya sendiri untuk mempertahankan dirinya.

Dengan lain perkataan, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan kemudian usaha – usaha yang dilakukan ke arah itu, adalah interen dengan sistem sosial itu sendiri, inilah yang disebut dengan kontrol sosial.

Mengapakah pengendalian sosial (kontrol sosial) itu diperlukan sistem sosial yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur. Proses itu dapat terjadi, karena para anggota masyarakat, mematuhi petunjuk – petunjuk yang diberikan oleh masyarakat, yang disebut sebagai norma – norma sosial, tetapi dalam kenyataan tidak semua anggota masyarakat selalu bersedia untuk menundukkan diri dan menyesuaikan tingkah lakunya kepada petunjuk – petunjuk tersebut. Orang – orang inilah yang disebut sebagai anggota – anggota masyarakat berkelakuan menyimpang. Oleh karena itu, apabila

¹¹⁾ Nurdin Hk , 1983, Perubahan Nilai-nilai di Indonesia , Alumni Bandung , hal. 86.

sistem sosial ingin berjalan dengan baik, maka sistem sosial itu harus bersiap dengan mekanisme menghadapi kemungkinan – kemungkinan seperti itu. Kontrol sosial merupakan mekanisme demikian itu. Secara singkat menurut **Berger & Berger**, bahwa kontrol sosial menyalurkan tingkah laku orang – orang agar sejalan dengan kemauan masyarakat.¹²⁾

Rudolf Von Ihering mengemukakan pendapat, dengan¹³⁾:

Laws were only one way to achieve the end namely social control.

Fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (sosial kontrol) berupa suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan berguna untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma – norma atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Cara menyelenggarakan kontrol sosial dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu yang bersifat fisik, kebendaan, simbolis ketiga macam cara tersebut merupakan sarana dan penguasa untuk mencapai tujuan yang berbeda – beda. Cara yang bersifat fisik bertujuan agar anggota – anggota masyarakat turut dan mengalah cara – cara yang bersifat kebencian bertujuan agar anggota – anggota masyarakat sebanyak mungkin

¹²⁾ Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 131

¹³⁾ Satjipto Rahardjo, Ibid, hal. 5.

mematuhi norma – norma yang berlaku, sedangkan yang bersifat simbolis bertujuan untuk menyatukan anggota – anggota masyarakat.

Di dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari Polisi, jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan, Polisi merupakan pemegang peran melaksanakan sistem tersebut. Empiris yang dihadapi Polisi sebagai petugas penegak hukum, tidak hanya ketentuan – ketentuan hukum yang dijalankan sebagai pengontrol sosial tetapi ada suatu siasat atau strategi yang mereka kuasai yakni, taktik dan teknik penyelidikan, sehingga tuntutan dari hukum pidana tersebut dapat bersifat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Teori Weber tentang hukum, memperkuat argumentasi di atas Weber menyatakan bahwa, suatu tuntutan besar disebut sebagai hukum apabila secara eksternal ia dijamin kemungkinan, bahwa paksaan (fisik atau psikologis) yang dianjurkan untuk memenuhi tuntutan atau menindak pelanggaran, akan ditetapkan oleh suatu perangkat terdiri dari orang – orang yang khusus menyempatkan diri untuk melakukan tugas – tugas tersebut.¹⁴⁾

¹⁴⁾ Satjipto Rahardjo, Op cit, hal. 294

Walaupun polisi merupakan sub – sistem dari sistem peradilan pidana, Weber menyebutkan bahwa orang – orang dapat mempunyai motif yang berbeda – beda untuk bertindak menurut apa yang diharuskan menurut hukum, bedanya orientasi kepada ketentuan – ketentuan hukum hanyalah merupakan salah satu motif, di lain pihak mereka bisa saja berorientasi kepada norma hukum, tanpa mentaatinya. Adanya petugas penegakan, yang mengakibatkan peranan hukum sebagai suatu penentu yang nyata dari suatu teori sosial, bukanlah merupakan pertanyaannya ya atau tidak, melainkan merupakan pertanyaan lebih atau kurang. Weber menunjukan hal ini dengan menyebutkan dua kasus marginal, mengenai hukum yang dijamin secara paksa dalam suatu kasus alat penegak hukumnya bukanlah suatu badan khusus, terdiri dari semua anggota masyarakat, dalam kasus yang lain petugas penegaknya bukan suatu badan yang netral, yang terdiri di atas semua pihak melainkan terdiri dari anggota-anggota kelompok yang berasosiasi dengan salah satu pihak.¹⁵⁾

Ungkapan Weber tersebut di atas menjadi kenyataan secara empiris tentang penegak hukum di Kabupaten Semarang. Adanya pranata sosial sebagai lembaga penegak hukum yang berasal dari pemerintah yang berkuasa bertujuan menertibkan pelanggaran

¹⁵⁾ Peters AAG, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks, Sosiologi Hukum, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 375.

terhadap peraturan – peraturan daerah, juga melaksanakan kontrol sosial tetapi hanya terbatas pada peraturan – peraturan daerah, tetapi ada sisi lain yang menarik untuk dianalisis, yakni ada beberapa aturan – aturan yang bersifat memaksa berlakunya dan diatur dalam aturan – aturan yang berlakunya secara umum. Serta wewenang penegakan hukumnya lebih berkompeten dilaksanakan oleh badan atau lembaga netral yang bertindak melaksanakan kontrol sosial dan mempunyai acara yang bersifat formal (Polisi).

Seperti telah diketahui bahwa birokrasi atau lembaga yang berdiri atau lain perkataan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa, dalam pandangan sosiologis menjadikan hukum berfungsi untuk sarana engineering sosial. Salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Polisi Pamong Praja yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban. Dari hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa secara tidak langsung pamong praja dalam melaksanakan penegakan hukum telah membuat hukum sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*). Membuat perilaku tersendiri dengan ciri – ciri karakteristik tersendiri serta membuat teknik dan taktik penyelidikan yang berbeda dengan Polisi dalam sistem peradilan pidana.

Melalui pendekatan dari sudut birokrasi (organisasi) Chambliss dan Siedman ¹⁶⁾ menyelidiki diskrepansi yang terdapat pada hukum dalam peraturan dengan bekerja hukum dalam masyarakat. Di dalam menganalisis penerapan hukum pada masyarakat yang kompleks, Chambliss dan Siedman menyatakan, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan transisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi – organisasi yang disusun secara formal dan birokrasi dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern tidak luput dari pengaruh birokratisasi itu. Diciptakanlah diferensiasi dalam fungsi – fungsi dengan masing – masing mendapatkan tugas – tugasnya sendiri yang meliputi berbagai segi bekerjanya hukum. Diferensiasi dalam fungsi – fungsi serta penetapan tugas – tugas yang harus dilaksanakan ditetapkan dalam peraturan – peraturan hukum. Setiap lingkungan pekerjaan yang tersusun dalam organisasi itu bekerja dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan – tujuan ini ditetapkan dalam ketentuan hukum positif sekaligus juga menentukan hubungan antara organisasi yang satu dengan yang lainnya.

¹⁶⁾ Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, hal. 73

Kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan pengadilan, dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi di dalam rangka penyelenggaraan hukum. Sekalipun untuk masing – masing unit organisasi itu telah ditetapkan tujuannya sendiri – sendiri, namun setiap organisasi itu dapat mengalami penggantian tujuan (*goals substitution / goal – displacement*). Setiap organisasi itu bekerja di dalam konteks sosial yang tertentu dan organisasi ataupun perorangan yang menjalankan organisasi itu melihat, bahwa menjalankan suatu kebijakan atau kegiatan tertentu dirasakan lebih menguntungkan daripada menjalankan yang lain. Dengan demikian Chambliss dan Siedman (Chambliss dan Siedman) ¹⁷⁾ dalam melihat adanya kecenderungan pada setiap organisasi untuk menggantikan tujuan – tujuan resmi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan hukum dengan kebijakan dan kegiatan sehari – hari yang dirasakan akan meningkat secara maksimal keuntungan yang diperoleh dan menekan sampai minimum hambatan – hambatan terhadap bekerjanya organisasi itu.

Prinsip atau kecenderungan ini oleh Chambliss dan Siedman dilihat pencerminannya di dalam administrasi hukum pidana. Disitu orang – orang

¹⁷⁾ Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, hal. 74.

yang mengalami penahanan sampai dengan penjatuhan keputusan oleh hakim adalah mereka yang dianggap paling tidak mampu untuk menyumbangkan sesuatu agar tidak mengalami penindakan oleh hukum. Di dalam kategori ini terdapat pula mereka yang apabila terhadapnya dilakukan penindakan oleh hukum, tidak akan menyebabkan timbulnya gangguan pada organisasi – organisasi yang menjalankan penegakan hukum. Kedua penulis itu juga menyebutkan praktek – praktek yang dilakukan atas dasar pertimbangan pragmatis sebagai suatu sub – culture organisasi bersangkutan. Sehubungan dengan penemuan – penemuan di atas dikatakan oleh mereka, bahwa deskripsi tentang apa yang diperkirakan akan terjadi (yaitu sebagaimana yang terjadi dalam peraturan). Sesungguhnya hampir tidak menunjukkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kenyataan sehari – hari. Apa yang sesungguhnya harus kita perhatikan bukanlah hanya cetak biru sistem hukum, tetapi tingkah laku para pelaku yang sebenarnya (dalam hal ini para pejabat hukum) dari hari ke hari. Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Chambliss dan Siedman adalah kenyataan yang sama juga diungkapkan oleh Skolnick, apabila yang disebut belakangan ini mengatakan, bahwa di dalam menjalankan pekerjaannya para petugas kepolisian mengembangkan sendiri seperangkat norma – norma informal atau asas – asas yang tersembunyi

sebagai respon terhadap hukum pidana formal (Chambliss dan Siedman)¹⁸⁾.

Berkaitan dengan hasil penelitian di atas, secara progresif dapat dideskripsikan dengan pendekatan teori dalam sosiologi hukum yang dapat dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamongpraja. Seperti dinyatakan oleh **Radeliffe – Brown** dengan mengartikan hukum sebagai kontrol sosial melalui penerapan sistematis kekuatan masyarakat yang diorganisasikan secara politik¹⁹⁾. Mempelajari untuk memahami tentang "**law – in-action**" sama pentingnya untuk mengetahui "**law – in – books**". Anggapan mengenai beroperasinya hukum itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi menyebabkan timbulnya perubahan hukum dan masyarakat. Titik tolak penulisan yang bisa dikembangkan adalah teori yang diungkapkan oleh **Austria Eugen Erhlich**, tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Norma hukum negara yang ditetapkan oleh yang berwenang (pembuat undang – undang) yang terutama menyangkut

¹⁸⁾ Satjipto Rahardjo, Op cit, hal. 75.

¹⁹⁾ Satjipto Rahardjo, Op cit, hal. 281.

kepentingan. Kenegaraan merupakan politik hukum negara, sedangkan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat disamakan, Kesadaran hukum masyarakat ²⁰⁾. Untuk melihat dan mempelajari bekerjanya hukum dalam masyarakat, perlu melihat hukum sebagai instrumen untuk mengatur masyarakat (*as a tool for social engineering*) yang dipergunakan oleh pembuat undang – undang, hukum pejabat pemerintah selaku ***social engineering*** untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan aliran ***Sociological Jurisprudence*** mempelajari fungsi hukum dari segi azas politik ekonomi, motif – motif psikologi dan faktor keputusan yang non yuridis (ajaran dari Roscoe Pound).

Ajaran dari Roscoe Pound tersebut mendekati kenyataan terhadap tindakan – tindakan yang diambil polisi pamong praja Kabupaten Semarang, dimana tindakan hukumnya sebagai alat untuk mengatur masyarakat (sebagai sarana untuk mengatur masyarakat*).

²⁰⁾ Sudjono Dirjosisworo, 1976, Kriminalitas dan Ilmu Forensik, PT. Tribisana Karya Bandung, hal. 6

Menurut **Parsons** ²¹⁾ tindakan itu secara logis menyangkut beberapa hal : 1). Tindakan mengisyaratkan adanya pelaku. 2). Tindakan harus ada teguran. 3). Tindakan harus dimulai dalam situasi. 4). Situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh si pelaku dan situasi yang bisa dikendalikan oleh pelaku.

Pengetahuan mengenai hal ini adalah perlu bagi pemahaman jalannya tindakan yang nyata. Apa yang esensial bagi konsep tindakan ialah bahwa harus ada suatu orientasi normatif. Bukan berarti bahwa ini harus dari type tertentu.

Untuk lebih dipahami tindakan tentang teknik dan taktik penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Pamongpraja maka masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem seperti yang diungkapkan oleh teori struktural – fungsional, yang terdiri dari bagian – bagian yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak akan pernah dapat dicapai secara sempurna akan tetapi secara prinsipil sistem sosial selalu cenderung untuk bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis. Disfungsionalisasi, ketegangan – ketegangan dan penyimpangan – penyimpangan selalu terjadi, akan tetapi dalam jangka panjang keadaan ini akan dapat diatasi melalui penyesuaian – penyesuaian dan proses institusionalisasi.

²¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, Masalah-masalah Sosiologi, Sinar Baru, Bandung, hal. 32.

Perubahan – perubahan secara drastis hanya terjadi pada bentuk luarnya saja, sedangkan unsur – unsur sosial budaya yang menjadi dasarnya tidak banyak mengalami perubahan – perubahan. Perubahan – perubahan sosial terjadi melalui tiga kemungkinan yaitu : penyesuaian – penyesuaian oleh sistem sosial itu sendiri terhadap pengaruh dari luar (*extra – sistemik – change*), perubahan – perubahan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional serta perubahan – perubahan karena penemuan – penemuan baru oleh anggota – anggota masyarakat itu sendiri.

3. Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa

Sehubungan dengan karakteristik pekerjaan polisi pamong praja terlihat dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Waka Satuan Polisi Pamong Praja, dasar bertindak polisi pamongpraja adalah peraturan – peraturan daerah yang bersangkutan dengan kewenangan tugasnya dan tugas tersebut diperkuat dengan surat keputusan Menteri Kehakiman No. 04/07/1984 tentang Buku Petunjuk lapangan tentang penyidik dan kewenangannya, bahwasannya penyidik pegawai negeri sipil kewenangannya terletak pada undang – undang yang mengaturnya, penyidik polisi kewenangannya terletak di dalam ketentuan KUHAP dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berbicara dalam konteks permasalahan dan persoalan tentang karakteristik polisi pada umumnya dapat di ilustrasikan dengan pandangan **Bittner**, bahwa seseorang polisi juga bukan seorang ilmuwan yang senantiasa menyimpan sikap kecurigaan ilmiah dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar terhadap segala segi dari masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini seorang polisi bukanlah ahli sosiologi atau kriminologi yang senantiasa akan mengamati dan menanyakan setuntas – tuntasnya mengenai sebab – sebab serta latar belakang seseorang yang melakukan kejahatan. Barangkali para ahli ini akan menghubungkan sebab – sebab tersebut pada ketiadaan kekuasaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Tetapi, bagi polisi hal – hal dan hubungan seperti itu tidak menjadi urusannya dan karena itu tidak perlu diperhatikannya. Pekerjaannya adalah untuk mengontrol kejahatan ²²⁾. Hal ini berlaku untuk semua perbuatan dan perilaku yang menyimpang dalam masyarakat (termasuk perbuatan a – susila).

Pengamatan (observasi) yang dilakukan terhadap polisi pamongpraja tentang pemberantasan kemaksiatan di Kabupaten Semarang, ada beberapa karakteristik yang menonjol, antara lain :

1. Tentang penerimaan laporan, laporan yang diterima berasal dari pemuka masyarakat. (RW, RT, Lurah atau Kepala Desa), jadi tidak

²²⁾ Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni Bandung, hal. 100.

seperti laporan atau pengaduan yang diterima polisi, dapat dilakukan oleh semua orang untuk melapor.

2. Kesepakatan untuk melaksanakan upaya paksa terhadap perbuatan a – susila, baik itu ditempat – tempat umum, obyek – obyek rekreasi, hotel – hotel, penginapan, wisma dan losmen – losmen.
3. Membedakan tempat penggrebekan (razia), antara hotel berbintang dengan penginapan Melati dan boleh dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja cenderung melakukan upaya paksa pada tempat – tempat melati.
4. Menyamaratakan semua kasus yang dijumpai, tanpa mempelajari dan menganalisis, apakah kasus tersebut masih dalam ruang lingkup (batas – batas) Peraturan daerah atau sudah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana.
5. Keberhasilan kerja Satuan Polisi Pamong Praja, ditandai dengan pemeriksaan dan penyelesaian kasus yang dilakukan melalui penangkapan, penggeledahan dan pemeriksaan surat – surat terhadap kasus a – susila (maksiat), di satu pihak (masyarakat) mendukung proses dan prosedur Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, karena latar belakang sosio – kultur masyarakat Kabupaten Semarang, di lain pihak, pribadi yang tersangkut dalam kasus (pelaku), merupakan penjatuhan moral yang sangat berlebihan (hak asasi) dari proses dan prosedur yang dijalankan oleh polisi pamongpraja (terutama

pemanggilan kedua orang tua, istri, suami dan) ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil pengamatan (observasi) tersebut terdapat fenomena terhadap perubahan masyarakat dan hukum. Di dalam optik sosiologi merupakan suatu obyek sosiologis yang menarik untuk diamati, terutama tentang karakteristik – karakteristik itu akan menimbulkan fenomena yang membawa perubahan sosial di masyarakat untuk bisa memahaminya.

Bila diamati lebih lanjut polisi pamongpraja juga merupakan suatu lembaga hukum, walaupun terbatas pada ruang lingkup peraturan daerah, tetapi pada prinsipnya mengemban tugas mewujudkan tujuan – tujuan hukum. Tujuan itu sering dirumuskan mewujudkan dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat. Dengan demikian, maka apa yang disebut sebagai lembaga polisi pamongpraja itu adalah pengorganisasian kegiatan – kegiatan untuk mengemban tugas sedemikian itu. Bersama – sama dengan lembaga lainnya, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengembangkan kehidupannya sendiri, dengan demikian terbentuklah semacam lingkungan kebudayaan sendiri sekitar organisasi – organisasi tersebut.

Sebagai suatu organisasi yang disusun secara rasional, maka polisi pamongpraja juga merupakan lembaga yang tidak luput tindakan – tindakan yang didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan yang lazim dilakukan oleh organisasi polisi pamongpraja tersebut. Adapun pertimbangan – pertimbangan rasional itu adalah :

1. Berusaha memperoleh hal – hal yang menguntungkan organisasinya sendiri sebanyak mungkin.
2. Berusaha untuk menekan sampai kepada batas – batas minimal beban-beban yang menekan pada organisasi.

Apabila diikuti perkembangan yang terjadi dalam lembaga polisi pamongpraja, meningkatnya beban pekerjaan yang diemban, akan menimbulkan kesulitan – kesulitan dalam organisasi penyelesaiannya. Pada waktu membicarakan masalah organisasi, telah disinggung bahwa organisasi itu selalu mempunyai tujuan. Hal yang menarik untuk ditonjolkan disini adalah bahwa organisasi tidak hanya mempunyai tujuan formal melainkan juga tujuan informal. Pada waktu ditunjukkan, bahwa organisasi bekerja dalam masyarakat dan oleh karena itu terdapat hubungan yang erat antara keduanya, yaitu dalam bentuk saling mempengaruhi.

Tujuan organisasi dirumuskan secara formal dan merupakan bagian dari struktur organisasi itu. Dari tujuan itu diketahui apa yang dikehendaki dan ingin dilakukan oleh organisasi itu dalam masyarakat. Apabila kita berbicara mengenai organisasi penegakan hukum maka dari tujuannya akan dapat diketahui petunjuk – petunjuk mengenai bekerjanya organisasi tersebut. Organisasi itu didirikan untuk melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu itu tentulah diarahkan kepada suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu apabila kita ingin menganalisa tingkah laku suatu organisasi penting untuk memperhatikan tujuannya. Penegakan hukum memang dilakukan

oleh orang – orang, tetapi segera harus ditambahkan disini, bahwa penegakan hukum adalah juga suatu kegiatan organisasi, dengan demikian, maka tindakan orang – orang tersebut tidak bisa dilepaskan dari organisasi tempat mereka menjadi anggotanya.

Tujuan organisasi (termasuk polisi pamongpraja) di dalam penegakan hukum bukan menentukan bagaimana tingkah laku karakteristik pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena polisi pamongpraja (organisasi) itu harus hidup di tengah – tengah masyarakat dan melayani masyarakat tersebut melalui penyesuaian – penyesuaian. Oleh **Chambliss dan Siedman** ²³⁾ proses penyesuaian menimbulkan gejala yang disebut sebagai ***Goal Substitution*** dan ***Goal Displacement***. Dalam ***Goal Substitution*** maka tujuan yang formal digantikan oleh kebijakan – kebijakan dan langkah–langkah yang akan menguntungkan organisasi di satu pihak dan di lain pihak yang menekan sedapat mungkin ancaman terhadapnya. Pada ***Goal Displacement*** tujuan – tujuan organisasi yang sudah diterima dan disetujui ditelantarkan demi tujuan yang lain).

Munculnya karakteristik pekerjaan Polisi Pamongpraja sebagai penyidik, dilatar belakangi perilaku penegakan hukum yang dilaksanakan. Menurut **Weber** ²⁴⁾ penegakan hukum mempunyai tahap – tahap perkembangannya, kecenderungan umum perkembangan hukum modern

²³⁾ Satjipto Rahardjo, Op cit, hal. 59.

²⁴⁾ Satjipto Rahardjo, Op cit, hal. 39.

adalah untuk menjadi rasional, perkembangan itu melalui tahap – tahap sebagai berikut :

1. Pengadaan hukum melalui pewahyuan (*revelation*) secara kharismatis. Dalam istilah Weber, pengadaan hukum secara demikian itu terjadi melalui apa yang disebutkannya "*law prophets*". Weber berpendapat, bahwa cara pengadaan hukum seperti inilah, yaitu melalui *law prophets*, yang benar – benar dapat disebut sebagai pengadaan hukum yang kreatif, yaitu menciptakan sesuatu dari nol. Pengadaan hukum seperti dilakukan oleh hukum bagaimanapun orisinilnya, tetaplah bertolak dari kaidah – kaidah hukum yang ada sebelumnya.
2. Penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para legal *honoratios*, yaitu penciptaan hukum oleh para Kantelarjuristen (*Cantelary Jurisprudence*). Cara ini mengandung suatu seni dan ketrampilan untuk menciptakan dan melakukan inovasi hukum. Di sini dapat di lihat, bahwa tahap ini Weber menunjuk pada pengadaan hukum yang tidak begitu saja jatuh dari keadaan entah berantah, melainkan hukum yang tercipta melalui teknik – teknik dan ketrampilan tersendiri. Dalam penciptaan ini ia terikat dengan preseden.
3. Pembebanan (*imposition*) hukum oleh kekuatan – kekuatan sekular dan teokratis.

Tahap yang terakhir adalah penggarapan hukum secara sistematis dan penyelenggaraan hukum yang dijalankan secara profesional oleh orang-orang mendapatkan pendidikan hukum secara ilmiah dan logis formal. Dari uraian di muka dapat diketahui, bahwa masalah penegakan hukum erat hubungannya dengan peringkat perkembangan dari pengorganisasian sosial, atau oleh Weber disebut dengan istilah dominasi. Cara – cara dan karakter penegakan hukum pada suatu masa bisa berbeda dair penyelenggaraannya pada masa yang lain, bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakat berbeda juga.

Hart ²⁵⁾ juga memperkuat perbedaan secara dikotomi yang menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara – cara penegakan hukumnya sendiri – sendiri. Melalui kehidupan normatif tentang masyarakat, yaitu yang didasarkan pada *primary rules of obligation* dan pada *secondary rules of obligation*. Pada *primary rules of obligation* penyelenggaraan dan penegakan hukumnya tidak mengenal peraturan terperinci hanya mengenal standar tingkah laku serta tidak ada spesialisasi dan diferensialisasi badan – badan penegak hukum. Kalau diperhatikan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pada transisi *primary rules of obligation*, tidak mempunyai spesialisasi dan mempunyai perbedaan dengan badan – badan lainnya.

²⁵⁾ Satjipto Rahardjo, Op cit, hal. 40.

Salah satu ciri penegakan hukm dalam masyarakat modern yang dianggap menonjol adalah sifat birokratisnya. Pola penegakan hukum birokratis merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan – keputusan dengan tingkat rasionalitas maksimal, tetapi Weber menambahkan adanya kecenderungan dari perkembangan hukum modern menjadi formal rasional, tetapi juga menunjukkan tendensi yang anti formalistis. Keadaan yang cukup bertentangan tersebut dijelaskan dengan mengatakan, bahwa perkembangan kualitas formal dari hukum justru melahirkan antinomi – antinomi yang aneh.

Pandangan dari Weber yang dinyatakan terakhir inilah yang muncul dalam penegakan hukum di Kabupaten Semarang antara badan – badan penegak hukum kepolisian dan badan penegak hukum Polisi Pamongpraja, sehingga perilaku yang mempola, yang dipunyai oleh polisi berdasarkan pada suatu ketentuan atau tatanan yang membuat suatu karakter tersendiri pada Polisi Pamongpraja seperti beberapa pengamatan yang peneliti ungkapkan di atas. Cara kerja dari Polisi Pamongpraja, secara umum diterima masyarakat, tetapi sebagian kecil masyarakat juga mempertentangkan, dan pertentangan ini bukan dalam arti prinsipil dari pemberantasan kemaksiatan, tetapi lebih banyak tonjolannya pada cara pemberantasan yang dilaksanakan oleh Polisi Pamongpraja.

Mereka yang mempertentangkan hal tersebut terdiri dari kalangan praktisi hukum di Kabupaten Semarang.

B. Faktor –faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Upaya Paksa

1. Hubungan Koordinasi Antara Polisi Pamong Praja dan Polri

Aturan tentang hukum acara pidana telah menetapkan tentang pengertian penyidik dan pelaku – pelaku penyidikan itu serta menggaris bawahi posisi masing – masing pelaku penegakan hukum tersebut. Antara lain diungkapkan secara yuridis bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Dalam penjelasan KUHP itu dijelaskan bahwa penyidik menurut ketentuan itu misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat migrasi dan pejabat kehutanan.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dan hukum, Kepolisian membuat aturan perilaku tentang polisi. Didalamnya juga terkait tentang hubungannya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pengemban tugas Kepolisian dilakukan oleh pihak – pihak yang antara lain :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Aparat Kepolisian Khusus
3. Satuan pengawas dan bentuk pengaman swakarsa lainnya.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan gambaran dan sketsa tentang hubungan koordinasi yang dilakukan Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, antara lain dalam bentuk:

1. Membantu pembinaan terus terhadap alat – alat atau badan pemerintah yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas, satuan pengamanan serta pembinaan segenap potensi kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa.
2. Bersama instansi terkait mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap setiap tindakan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Mengaktualisasikan hubungan dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil seringkali dalam pelaksanaannya berbentuk surat keputusan bersama, seperti :

1. Surat Keputusan Bersama Panglima Angkatan Kepolisian, Jaksa Agung dan Gubernur Bank Indonesia tentang pembentukan Team Pemeriksa Khusus Bank – Bank.
2. Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengamanan Usaha Undian Dan Pengumpulan Dana Sosial yang disingkat Polsus Dana Sos.
3. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pengamanan pertambangan timah.²⁶⁾

2. Fungsi Upaya Paksa Bagi Penyidik

Administrasi peradilan pidana, mekanisme kerjanya terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berjalannya sistem peradilan pidana terlebih dahulu melalui polisi sebagai penyidik,. Polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik merupakan ujung tombak penegakan hukum yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena pekerjaan itu, penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

²⁶⁾ Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, Grasindo Jakarta, hal. 67

3. Menyuruh berhenti seseorang, dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Agar polisi sebagai penyidik dapat bertindak guna melaksanakan tugas kewajibannya, haruslah diberi kekuasaan dan wewenang – wewenang tertentu. Di samping wewenang dan kekuasaan tersebut di atas, dalam konsepsi teori Kepolisian diisyaratkan, bahwa Kepolisian bukan hanya bertindak sebagai "*crime hunter*" akan tetapi juga sebagai pemerhati sekaligus pemecah masalah sosial (*problem solver*) pemelihara sosial (*maintenance officer*) dan bahkan perekayasa sosial (*social engineering*)

Upaya paksa sebagai sub – sistem pekerjaan Polisi sebagai penyidik akan bekerja, apabila seorang Polisi dihadapkan pada suatu satuan untuk menegakkan hukum atau adanya ancaman terhadap ketertiban masyarakat, maka ia harus membuat keputusan apakah kenyataan yang dihadapinya

merupakan pelanggaran hukum. Demi ketertiban melakukan pekerjaan untuk menangkap, menahan atau menggeledah seseorang.

Secara kongkret, dalam menjalankan tugasnya Polisi dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara menjalankan Undang - Undang dan menjaga ketertiban, kedua tugas ini menurut **Herbert Packer** digambarkan melalui model tentang bekerjanya hukum yang disebut sebagai "*Crime Control Model and Due Process Model*".²⁷⁾

Crime Control Model mendasarkan pada pernyataan bahwa penekanan terhadap perbuatan jahat betul – betul merupakan fungsi yang sangat penting yang harus diperlihatkan dalam proses penegakan hukum, sebab dengan hanya jaminan ketertiban, anggota – anggota masyarakat dapat dijamin kebebasannya dalam menjalankan kehidupan sehari – hari. Oleh karena sarana untuk mendeteksi kejahatan dan mematuhi hukuman terbatas, maka Polisi diberikan kepercayaan untuk mencari penjahat dan melakukan upaya paksa terhadap orang – orang yang kemungkinan melakukan perilaku tersebut. Ciri utama dari penegakan hukum adalah dimilikinya diskresi oleh pengambil keputusan yang bersifat individual yaitu bagaimana dan kapan mereka memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan tugasnya. Penegak hukum itu sebenarnya tidak lain adalah pembuat keputusan (*Decision making*).

²⁷⁾ Is Susanto, 1993, Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia, UNDIP, Semarang.

Oleh *Skolnick* disebut sebagai *seclusion of administration*²⁸⁾. Oleh karena itu Polisi menempatkan dirinya di garis depan dalam pengambilan keputusan dan mempunyai kedudukan penting dalam proses normalisasi.

Polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana adalah badan yang ditugasi untuk mewujudkan ancaman sanksi pidana menjadi kenyataan. Dari sini maka posisi sebagai aparat keamanan dan ketertiban yang bersifat mempertahankan status quo menjadi sangat menonjol (tokoh antagonis).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, tokoh antagonis ini menjadi himbauan dunia internasional terhadap perlindungan keamanan masyarakat dari kejahatan. Serta kemungkinan – kemungkinan atau kecenderungan aparat penegak hukum melakukan tindakan – tindakan penanggulangan, berdarah panas, panik dan brutal di luar batas hukum. Hal ini disebabkan aparat penegak hukum mempunyai peranan yang menonjol dalam melakukan perlindungan hak – hak asasi manusia.

Penekanan perhatian dunia internasional, khususnya yang berkaitan dengan Polisi, terutama dalam melaksanakan upaya paksa sebagai upaya penegakan hukum antara lain terdapat pada :

1. Resolusi No.34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang " *Code of Conduct for law enforcement officials* "

²⁸⁾ Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hal. 94.

2. Rekomendasi the Hagee (Den Haag) tanggal 14 – 15 April 1990.

Dalam kesimpulan dan rekomendasi dari " *Symposium on the role of the police in the protection of human rights* " serta pedoman sikap dan perilaku aparat penegak hukum.

Dengan mengemukakan hal tersebut di atas, makin terlihat tokoh antagonis semakin menonjol pelaksanaannya dengan kata lain wibawa penegakan hukum lebih ditekankan pada mempertahankan status quo, bahkan pernyataan ini didukung oleh laporan Seminar Hukum Nasional ke IV tahun 1979 yang mengatakan :

" Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945 ".

Hukum yang fundamental itu diperkuat dengan dikeluarkannya pernyataan yuridis oleh Kapolri tentang penetapan penggunaan " **Buku saku pengetahuan dasar bagi anggota Polri di lapangan** ". Pernyataan yuridis tersebut sesuai dengan kesepakatan secara yuridis negara Internasional tentang " *Code of conduct for law enforcement official* ", yang antara lain perilaku penegakan hukum tersebut menghormati dan menjunjung tinggi hak – hak dan kewajiban asasi manusia ²⁹⁾ :

²⁹⁾ Barda Nawawi Arif, 1993, Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang

1. *In the performance of their duty, law enforcement officials shall respect and protect human dignity and maintain and uphold the human rights of the person.* (Article 2 code of conduct PBB sesuai dengan pedoman No.3 buku saku pedoman pengetahuan dasar bagi anggota Polisi di lapangan).
2. *Law enforcement officials shall respect the law and the present code. They shall also, to the best of their capacity, prevent and rigorously ofspose any violations of them.* { Article 8 code of conduct PBB, sesuai dengan buku saku No.4 tentang Polisi " mentaati seluruh peraturan – peraturan negara dan menghormati norma – norma yang berlaku dalam masyarakat

Walaupun penegakan hukum dengan melakukan upaya paksa merupakan sub sistem dari pekerjaan Polisi dalam sistem peradilan pidana, sekalipun dengan aturan – aturan yuridis yang memback – up pelaksanaannya serta pedoman – pedoman yuridis yang harus ditaati oleh setiap penegak hukum, tetapi ada suatu hal yang sangat menarik dari hasil laporan Kongres PBB ke V ³⁰⁾ mengenai *The prevention of Crime and Treatment of offenders* di dalam agenda " *The Emerging Role of The Police and other law enforcement agencies* " :

³⁰⁾ Barda Nawawi Arif, Op cit, hal 25.

" The Police were a part and not separate from the community and that the majority of a policemen's time was spent on service oriented task rather than on law enforcement duties ".

Dari hal yang disinggung di atas terlihat bahwa tugas – tugas dan pekerjaan polisi lebih banyak berorientasi pada pelayanan masyarakat (*service oriented task*) daripada tugas – tugas penegakan hukum (*law enforcement duties*).

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Koordinasi

Dari hasil penelitian, baik melalui hasil wawancara maupun melalui hasil pengamatan terhadap hubungan koordinasi antara Polisi dan Polisi Pamongpraja, terutama dalam melaksanakan upaya proses terhadap pelaku-pelaku asusila di Kabupaten Semarang, terdapat beberapa faktor, baik yang menghambat ataupun yang mendorong terlaksananya hubungan koordinasi.

1. Faktor – faktor Pendukung

Dalam melaksanakan upaya paksa, Polisi Pamongpraja seharusnya mempunyai hubungan koordinasi dengan Polri, karena ada beberapa faktor pendorong untuk dilaksanakannya hubungan koordinasi fungsional itu, antara lain :

- a. Faktor yuridis, adanya ketentuan fungsional yang mengatur Undang – undang tentang koordinasi dan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di bawah koordinasi dan pengawasan Polisi Polri (Pasal 7 ayat 2 KUHAP) serta kepentingan penyidikan, Polisi memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 107 ayat 1 KUHAP). Dalam hal ini dugaan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, penyidik pegawai negeri sipil melaporkan hal itu kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat 2 KUHAP). Begitu juga dalam hasil penghentian penyidikan, pemberitahuan tentang hal itu disampaikan kepada penyidik Polisi dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3 KUHAP).
- b. Faktor sosiologis dalam melaksanakan tugas dilapangan parapenagak hukum, baik Polri maupun Polisi Pamong Praja menemukan suasana yang lain, tidak seperti susunan huruf – huruf yang ditentukan dalam suatu UU atau peraturan mereka menemukan suasana yang membahayakan jiwanya, sehingga kekerasan sering terjadi pada saat upaya paksa dilaksanakan. Prof. DR Satjipto Rahardjo menyebut mereka dengan penegak hukum jalanan. Seandainya Polisi Pamongpraja merasa enggan untuk berkoordinasi dengan Polisi, sudah sepantasnyalah diketahui oleh Polisi Pamongpraja bahwa yang berhak menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah Polisi bukan personil TNI selain

Polisi, tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Yang bisa memberantas dan mencegah meluasnya penyakit masyarakat ini adalah Polisi, hal ini disebabkan karena memang mempunyai tugas untuk itu.

- c. Faktor keselamatan jiwa pribadi, setiap tindakan penegakan hukum mempunyai risiko yang tidak kecil. Pada saat berhadapan dengan pelaku – pelaku kejahatan, selalu terjadi konfrontasi mental bahkan konfrontasi fisik. Untuk hal ini dibutuhkan pengamanan jiwa pribadi seperti halnya Polisi dilengkapi dengan senjata, borgol dan lain – lain, serta kemampuan bela diri. Lebih lagi untuk Polisi Pamongpraja yang dalam melaksanakan upaya paksa akan terjadi efek samping (*Side effect*) yang antara lain terjadi sentimen pribadi, menjurus kepada unsur dendam karena mepermalukan sipelaku dengan memanggil pihak keluarga ke Kantor Polisi Pamongpraja. Kekuatan hukum yang bagaimana yang harus dipertahankan oleh Polisi Pamongpraja, selain kekuatan yang ada pada Polri.

2. Faktor – faktor Penghambat

Adanya beberapa faktor yang menghambat untuk diadakannya koordinasi dengan Polisi, berdasarkan wawancara dan pengamatan terungkap :

- a. Menurut Polisi Pamongpraja, diadakan koordinasi dengan Polisi, sering tidak membawa hasil atau lain perkataan pada saat diadakan penggerebekan, diberitahukan kepada pihak kepolisian bahwasanya Polisi Pamongpraja mau operasi, sesampai ditempat kejadian sudah kabur (tidak ada ditempat), kecuali operasi gabungan melibatkan unsur – unsur terkait, seperti Kodim, Kepolisian, Depsos.
- b. Faktor biaya, menurut Polisi Pamongpraja, bilamana diadakan koordinasi dengan pihak kepolisian, maka seluruh biaya operasi ditanggung oleh Polisi Pamongpraja, sementara itu mereka (Polisi Pamongpraja) yangmendapat uang lelah hanya yang tercantum dalam surat tugas pad awaktu operasi itu dilaksanakan.
- c. Berdasarkan pengamatan, ada faktor yang sangat inten dalam tubuh lembaga, yakni arogan lembaga untuk mengadakan koordinasi, karena keberhasilan tugas yang dilaksanakan oleh instansi tidak tergantung pad ainstansi lain, seperti halnya posisi Polisi Pamongpraja dengan posisi Polisi, sehingga melupakan posisi serta aturan hukum negara.
- d. Menurut Polisi, faktor utama yang menghambat untuk diadakannya koordinasi adalah perbedaan instansi penegak hukum, dimana dalam lembaga Polisi Pamongpraja tersebut hanya terdapat dua orang penyidik dan kadang kala dari pantauan Polisi di lapangan,

pada saat Polisi Pamongpraja mengadakan operasi tidak membawa atau mengikutsertakan penyidik, hanya petugas pamongpraja yang bertugas sebagai patroli dan di dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penyidik pegawai negeri sipil yang harus mengadakan hubungan koordinasi dan pengawasan dibawah penyidik Polri.

- e. Menurut pandangan dan tanggapan dari Polri, sampai saat ini belum satu kasuspun di laporkan oleh Polisi Pamongpraja kepada Polisi terhadap tugas – tugas yang dilaksanakan oleh Polisi Pamongpraja tentang pemberantasan kemaksiatan, padahal Polisi pernah membuat surat teguran secara resmi kepada .Bupati maupun Waka Satuan Polisi Pamong Praja, tentang tugas yang mereka laksanakan karena hasil penjarangan yang dilakaukan terdapat juga unsur – unsur pidana kesusilaan, tetapi tidak ada jawaban dari .Bupati maupun Waka Satuan Polisi Pamong Praja untuk merealisasikan surat teguran tersebut.

Secara sosiologis faktor penghambat dan pendorong dapat dianalisis. Terlepas hubungan koordinasi. Hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu fungsi sosial melainkan juga sebagai suatu struktur yang memiliki ciri – ciri Institusionalnya sendiri, yang menentukan cara bekerjanya.

Meskipun mungkin ada suatu kebutuhan sosial bagi hukum untuk memainkan fungsi – fungsi sosial penting, namun kebutuhan itu sendiri tidak menghasilkan cara – cara untuk memenuhinya. Lagi pula fungsi yang serupa dapat dijalankan dengan berbagai cara oleh sistem hukum yang sering kali karena alasan – alasan historis yang kebetulan semata – mata, memiliki organisasi internal dan kebudayaan berbeda dan oleh karena itu kehidupan hukum yang dihasilkan akan sangat berbeda mau tidak mau kita harus berpaling kepada sosiologi hukum di bawah pandangan Max Weber.

Terbentuknya hukum baru menurut Max Weber dapat dengan dua cara : mereka muncul secara bertahap atau mereka dapat diciptakan secara sengaja (Weber dalam AAG. Peters, 1983:365). Pengaruh terbentuknya hukum baru menurut Max Weber bekerja dengan tiga cara :

1. Sanksi yang diberikan oleh kekuasaanlah yang pada akhirnya menentukan kemampuan sosial dari aturan hukum. Kekuasaan sering merupakan faktor penentu dalam pembentukan hukum.
2. Kepentingan – kepentingan administratif dari penguasa selalu merupakan suatu pengaruh besar terhadap pembentukan hukum.
3. Faktor kondisional penting dari kekuasaan politik dalam bentuk tertentu, selain mengarahkan pembentukan hukum kearah tertentu (lihat AAG. Peters, 1988:366-367).

Kalau seandainya faktor – faktor penghambat, Polisi Pamongpraja mempunyai pendirian untuk menegakkan kebiasaan yang ada .di kabupaten semarang, yang berpendirian bahwa perbuatan asusila merupakan perbuatan yang mempermalukan adat istiadat(maka Weber menunjukkan kontras antara hukum dengan kebiasaan. Kebiasaan berbeda dari hukum karena, (a). tidak ada persyaratan normatif untuk mentaati tipe aktivitas itu dan (b) tidak ada alat untuk menegakkannya. (Weber dalam AAG. Peters, 1988:387). Begitu pula antara hukum dan ketertiban Weber meninjau dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dari sudut pandang yuridis menekankan segi prosedur, sudut pandang sosiologis menekankan pada hasil yang dicapai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan – kesimpulan antara lain :

1. Pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan yang dikuasai oleh polisi pamong praja kabupaten Semarang dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila kurang memadai karena hanya dibekali pengetahuan dasar tentang kepolisian dan hukum pidana tanpa pengetahuan tentang proses penyidikan secara lengkap.
 - a. Karakteristik yang sangat menonjol dari Polisi Pamongpraja adalah menertibkan setiap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan – peraturan yang berlaku di daerah.
 - b. Penyelesaian kasus – kasus oleh Polisi Pamongpraja dalam kenyatannya memperlihatkan adanya beberapa indikasi penyimpangan yang antara lain :
 - i. Melaksanakan upaya paksa tanpa surat perintah, hanya memakai atribut dan pakaian dinas lengkap Polisi Pamongpraja.

- ii. Mempunyai kecenderungan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain (Dinas /Instansi) selain Polisi.
- iii. Polisi Pamongpraja tidak membedakan antara kasus kejahatan dengan kasus pelanggaran.
- iv. Tidak ada penjelasan resmi secara yuridis tentang pengertian tindakan penertiban dan batas – batas kewenangan bertindak serta kurang menghargai hak asasi manusia.

2. Adanya faktor pendukung dan faktor penghambat untuk diadakannya hubungan koordinasi antara Polisi dengan Polisi Pamongpraja, antara lain :

a. Faktor pendukung antara lain :

- i. Faktor yuridis seperti yang terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- ii. Faktor sosiologis untuk keselamatan jiwa pribadi Polisi Pamongpraja terhadap serangan adanya unsur – unsur kekerasan dan bilamana timbulnya perlawanan dari si pelaku pada saat itu atau kemudian hari.

b. Faktor penghambat antara lain :

- i. Menurut pandangan Polisi Pamongpraja, bila diadakan hubungan koordinasi dengan Polisi, sering tidak membawa hasil atau si pelaku tidak lagi berada di tempat kejadian.
- ii. Faktor biaya , dengan adanya koordinasi berarti terdapat penambahan biaya yang harus dikeluarkan.
- iii. Menurut pandangan Polisi. Faktor penghambat adalah perbedaan instansi serta berdasarkan pengamatan Polisi, pada waktu Polisi Pamongpraja melakukan penertiban jarang mengikut sertakan penyidik pegawai negeri sipil, sedangkan secara yuridis untuk diadakan hubungan koordinasi dengan Polisi perlu adanya penyidik pegawai negeri sipil.
- iv. Faktor yang sangat menghambat adalah faktor arogan antar lembaga.

A. SARAN

1. Seyogyanya setiap perekrutan Polisi Pamong Praja adalah PNS yang telah menyandang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat lebih profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas di lapangan .
2. Penegakan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk apapun haruslah bersandarkan dan melindungi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan tempat dan keadaan.
3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Pamongpraja di Kabupaten Semarang, sebaiknya memberikan penjelasan tentang pengertian tindakan penertiban dan mempelajari kembali batas – batas kewenangannya, untuk mencegah jangan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Polisi, serta mempelajari kembali keinginan pembuat Undang – undang nasional mencantumkan dalam salah satu pasal aturannya untuk diadakan hubungan koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1989 : *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta
- Alpert, Geoffrey. P, 1985 : *The American System of Criminal Justice*, Sage Publication, Beverly Hill.
- Amirin, Tatang. M , 1986 : *Menyusun Rencana Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Abdul Wahid, 1994 : *Hukum, Suksesi dan Arogandi Kekuasaan*, Tarsito, Bandung.
- Abdulsyani, 1987 : *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1993 : *Tugas Yuridis Polri dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum*, Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia, 19-20 Juli 1993, Semarang.
- _____ 1994 : *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, UNDIP Semarang.
- _____ 1996 : *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bawengan . GW , 1989 : *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bannurusman, 1995 : *Makalah Sambutan KAPOLRI pada Pembukaan Seminar Nasional Kepolisian Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bruggink . J. J. H , 1996 : *Refleksi tentang Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Dirjen Dikti, 1995 / 1996 : *Bahan Penataran P4 dan Bahan Referensi penataran*, Jakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1990 : *Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Dan Aplikasi*, YA3, Malang.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 : *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____ 1990 : *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____ 1990 : *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Nurdien, 1983 : *Perubahan Nilai-nilai di Indonesia Alumni*, Bandung.
- Skolnick, Jerome, 1968 : *Justice Without Trial*, John Wiley & Sons, Inc. New York, London, Sydney. Sudjono Dirjosisworo, 1976 : *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, PT. Tribisana Karya, Bandung.
- _____ 1983 : *Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Hulsman . MC. HC, 1984 : *Sistem Peradilan Pidana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Karjadi, M, 1978 : *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Politeia, Bogor.
- Kelana, Momo, 1994 : *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Kuntowijoyo, 1994 : *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, Bentang Budaya, Yogyakarta.
- KUHAP : 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya.
- Marmosoedjono, Soekarton, 1989 : *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Muladi, 1995 : *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Pusat studi Kepolisian, Undip, Semarang.
- Neumann, Frans, 1986 : *The Rule of Law. Political Theory and The Legal System in Modern, Society*, Berg Leaming Spa, Heiddberg : Donver, New Hampshire. USA.
- Peters . AAG, 1988 : *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku I, Sinar Harapan, Jakarta.

- Poerwadarminta, W.J.S, 1962 : *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983 : *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____ 1983 : *Masalah Penegakan Hukum*. Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- _____ 1985 : *Beberapa Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung.
- _____ 1986 : *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- _____ 1991 : *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____ 1993 : *Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substantif*. Makalah Simposium Nasional Polisi, 19 – 20 Juli, Semarang.
- _____ 1996 : *Institusi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Bentuk Lain*. Bahan Lokakarya BAPPENAS Tentang Pembangunan Hukum, 12-13 Agustus 1996, Semarang.
- _____ 1996 : *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*. Bahan Seminar Sosiologi Hukum, 12-13 November 1996, Semarang.
- Rasjidi, Lili, 1993 : *Hukum sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994 : *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 : *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____ 1990 : *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____ 1990 : *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 : *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____ 1990 : *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____ 1990 : *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.

- Saleh, Roeslan, 1984 : *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 1988 : *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudjono Dirjosisworo, 1976 : *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*, PT. Tribisana Karya, Bandung.
- _____ 1983 : *Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Saragih, Djasadin, 1976 : *Terjemahan dari M. Schur, Law and Society : A Sociological View*, Bahan Bacaan Hukum dan Masyarakat. Surabaya.
- Schaffmeister, 1991 : *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang*, Terjemahan : Tristam Pascal Moeliono dari : *De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Senat Mahasiswa FH-UII, 1995 : *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri, 1989 : *Metode Penelitian Survei*, LP3ES. Jakarta.
- Soedarto, 1981 : *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1985 : *Sosiologi Ruang Lingkup dan Aplikasinya*, CV. Remadja Karya, Bandung.
- _____ 1986 : *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soenaryo, 1985 : *Metode Riset I*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- _____ 1986 : *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soenaryo, 1985 : *Metode Riset I*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soesilo . R, 1980 : *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.
- Susanto, IS, 1993 : *Kajian Sosiologis terhadap Polisi*. Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia, UNDIP, Semarang.
- Singarimbun, Sofian Effendi, 1982, *Metode Peneltian Survey* , LP3ES, Cetakan Pertama , Jakarta
- Tabah, Anton, 1993 : *Peran Polri dalam Mengantisipasi Kejahatan di Indonesia*, Bigrif Publishing, Yogyakarta.
- Winarno Surachmad, 1975, *Dasar-dasar dan Teknik Reaserch*, Tarsito, Bandung
- Abdul Wahid, 1994 : *Hukum, Suksesi dan Arogandi Kekuasaan*, Tarsito, Bandung.
- Walker, Samuel, 1992 : *The Police in America*, An Introduction, Second Edition, Mc Graw-Hill, Inc. USA.
- Wignyo Soebroto, Soetandyo, 1976 : Terjemahan dari Julius Stone : *Law and the Social Sciences*, Minneapolis, University of Minnesota Press 1969. Dalam Kumpulan Bahan-bahan Bacaan Hukum dan Masyarakat. Surabaya.
- Yasin Tasyrif ,1996: *Teknik penelitian Sosial dan Komunikasi Ilmiah*, Undip
- UU No. 2 Tahun 2002, 2002 : *Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Surat Keputusan Bupati, *Semarang*, No. 061/8/2002 : Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.